

BAB III

AURI DAN POLITIK MILITER SEJAK RE-ORGANISASI HINGGA PERISTIWA G-30-S (1962-1965)

Reorganisasi angkatan bersenjata adalah suatu langkah untuk menciptakan profesionalitas dan optimalisasi angkatan perang, yang secara politik diikuti dengan proses integrasi dalam Angkatan Bersenjata. Usulan pelaksanaan reorganisasi telah dirintis sejak masa Kabinet Karya (1958) oleh Perdana Menteri Djuanda dan Jenderal AH. Nasution, yang panitianya dipimpin Letjen Hidayat. Dalam panitia usulan tersebut, dihasilkan konsepsi bahwa kekuatan angkatan bersenjata haruslah memiliki panglima sebagai pimpinan tertinggi yang membawahi kepala-kepala staf angkatan-angkatan dan kepolisian.

Lewat Keputusan Presiden No.225/PLT/1962, maka usulan reorganisasi tersebut mendapatkan penegasan secara formal. Kekuatan militer yang awalnya terdiri dari empat angkatan dengan wadah yang terpisah, disatukan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang langsung dipimpin di bawah komando Presiden Sukarno. Kepala staf angkatan-angkatan dan kepolisian, diubah gelarnya menjadi panglima angkatan dan statusnya ditingkatkan sebagai menteri.¹ Secara politik, struktur tersebut sangat menguntungkan presiden, karena presiden dapat dengan mudah merangkul salah satu angkatan kepihaknya apabila diperlukan untuk mendukung kebijakan politiknya.

¹ Markas Besar TNI, *Sejarah TNI Jilid III (1960-1965)*, (Mabes TNI, Jakarta: 2000), hal. 1-2.

Adapun ambisi Presiden Sukarno menjadikan dirinya sebagai pusat kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata, didasari kekhawatiran menguatnya pengaruh Nasution yang anti-komunis sejak 1959. Presiden menyadari keberadaan Nasution dan Angkatan Darat yang anti komunis, merupakan hambatan terhadap keberlangsungan ideologi Nasakom, seperti tercermin pada kasus pelarangan PKI di tiga S (Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan) pada tahun 1960, saat Nasution menjabat sebagai KSAD. Adalah suatu kewajaran, apabila kemudian reorganisasi angkatan bersenjata yang awalnya dimaksudkan Nasution untuk menyatukan kepemimpinan angkatan bersenjata di bawah kendalinya, justru dijadikan Sukarno sebagai alat menyingkirkan kedudukan Nasution. Kedudukan Nasution sebagai KSAD, kemudian digantikan oleh Letjen Ahmad Yani. Nasution kemudian di tempatkan sebagai menteri koordinator pertahanan dan keamanan yang lebih bersifat menjalankan fungsi administrasi antara empat angkatan.

3.1 Reorganisasi AURI

Proses reorganisasi angkatan bersenjata, secara formal terjadi setelah terjadi pergantian kepemimpinan AURI dari Laksamana Suryadarma kepada Laksamana Madya Omar Dani. Di bawah kepemimpinan Men/Pangau Omar Dani, AURI mulai melakukan proses reorganisasi untuk menjadikan AURI sebagai kekuatan militer yang handal dan lebih profesional. Staf Angkatan Udara dibagi menjadi tiga bagian yakni: 1) Deputi Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Operasi dipimpin Komodor Udara Sri Mulyono Herlambang yang kemudian digantikan Ignatius Dewanto. 2) Deputi Menteri/Angkatan Udara Urusan Administrasi (DMPA)

Laksamana Muda Udara Suharnoko Harbani yang kemudian digantikan Komodor Udara D. Suryanto 3) Deputi Menteri/Angkatan Udara Urusan Logistik (DMPL) Komodor Udara R. Andoko. Dalam melaksanakan tugas para deputi dibantu direktur dan asisten direktur.²

Selanjutnya dalam institusi AURI dibagi menjadi dua bentuk komando yaitu fungsional dan regional. Komando fungsional membawahi eselon Komando Operasi (Koops), Komando Pertahanan Udara (Kohanud), Komando Pertahanan Pangkalan Angkatan Udara (Koppau), Komando Pendidikan (Koppend), Komando Logistik (Kolog) dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskau). Adapun Komando Regional Udara (Korud) secara administratif membawahi pangkalan didaerah. Komando yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1962, membagi wilayah Indonesia dalam delapan komando, meliputi: Korud I Sumatera yang berkedudukan di Palembang, yang kemudian dipindahkan pada 1963 ke Medan, Korud II Kalimantan-Bliton dan Natuna berkedudukan di Banjarmasin yang kemudian tahun 1963 dipindahkan ke Medan, Korud III Sulawesi dan Nusa Tenggara berkedudukan di Makasar, Korud IV Maluku-Irian Barat berkedudukan di Ambon, Korud V Jakarta berkedudukan di Jakarta, Korud VI Jawa-Barat-Pekalongan-Banyumas berkedudukan di Bandung, Korud VII Yogyakarta berkedudukan di Yogya dan Korud VIII Jawa Timur-Jawa-Tengah-Bali dan Lombok berkedudukan di Malang.³ Selain komando-komando tersebut, pada tanggal 10 Agustus 1962 terbentuk pula Komando

² Pusjarah TNI, *Sejarah TNI Jilid III 1960-1965*, (Jakarta: Mabes TNI, 2000), hal. 20.

³ *Ibid.*, hal 21.

Pertahanan Udara Nasional (Kohadnudnas) terdiri atas Komando Udara Angkatan Udara, Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat (Kohanunad).

Dalam perhitungan kekuatan militer AURI, pada periode 1960-1966, AURI memiliki anggota berjumlah 26.173 personil dengan perincian 14.073 anggota militer yang terdiri dari: 808 perwira, 5365 bintara dan 7880 tamtama. AURI. Adapun jumlah pesawat adalah 495 pesawat, dengan jenis-jenisnya meliputi: 1) Pesawat *glider* 2) Pesawat latih yang terdiri atas pesawat EL-4J, BT-13, AT-6/16, TS-8 *Blies*, T34, HF-2, C-64 dan L-12. 3) Pesawat helikopter yang terdiri dari Helikopter *Bell-47J*, MI-4, SM-1 dan H-360. 4) Pesawat *amphibi* yang terdiri atas jenis pesawat PBY-5A, UF-1 dan G-21A. 5) Pesawat angkut yang terdiri atas pesawat *Auster* DHC-3, C47, Avia14, C-130B, L-180 dan IL-10. 6) Pesawat pemburu yang terdiri dari jenis pesawat P-51 *Mustang*, LA-11, MIG-15, MIG-17 dan pesawat MK-55. Serta 7) Pesawat pembom yang terdiri atas jenis pesawat TU-2, B-25, B-26 dan IL-28.⁴

Dengan adanya penambahan kekuatan militer dan peningkatan skuadron, AURI kemudian mengadakan pengelompokan tugas dalam komponen-komponen kesenjataan yang berada di bawah Komando Operasi. Pengelompokan tugas tersebut terwujud dalam beberapa wing, sebagai berikut: 1) Wing Operasional 001/Lintas Udara, berkedudukan di Halim Perdanakusumah, Jakarta terdiri atas komponen-komponen kesenjataan transport jarak jauh, transport jarak sedang, transport khusus VIP dan *aerial survey*. 2) Wing Operasional 002/Taktis, berkedudukan di Abdulrachman Saleh, Malang terdiri atas komponen-komponen kesenjataan pembom

⁴ *Ibid.*, hal. 24-25

jarak dekat, pemburu dan SAR. 3) Wing Operasional 003/Strategis, berkedudukan di Iswahyudi, Madiun terdiri atas komponen-komponen kesenjataan pembom. 4) Wing Operasional 004/Helikopter, berkedudukan di Semplak, Bogor terdiri atas komponen-komponen kesenjataan transport berat, transport ringan dan agrikultural.⁵

Selain proses modernisasi organisasi dan perlengkapan persenjataan militer, reorganisasi angkatan bersenjata semakin memperkuat dukungan AURI terhadap Presiden Sukarno. Bahkan kemudian dalam beberapa kesempatan, presiden sering menyebut AURI sebagai anak lanangnya. Lebih lanjut, Presiden Sukarno memberikan kepoercayaan beberapa jabatan operasi militer yang penting kepada perwira AURI, seperti penunjukkan Leo Wattimena sebagai Wakil Panglima Operasi Mandala dan penunjukkan Omar Dani sebagai panglima Siaga dalam konfrontasi dengan Malaysia.

Menjelang meletusnya peristiwa G-30-S 1965, kebijakan AURI dibawah pimpinan Men/Pangau Omar Dani tetap menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden Sukarno dan ideologi Nasakom. Sebagai langkah konkret, Omar Dani kemudian menjadikan ajaran-ajaran Sukarno dan juga Marxisme sebagai kurikulum Sekolah Staf Komando AURI (Seskau), dimana untuk pengajaran teori-teori marxisme, AURI mendatangkan orang-orang komunis. Omar Dani menyatakan bahwa upaya memasukkan ajaran presiden dan *Marxisme* dalam kurikulum Seskau adalah

⁵ *Ibid.*, hal. 26.

bertujuan menciptakan Sukarno-Sukarno kecil sehingga melahirkan anggota AURI yang Pancasilais dan Nasakomis.⁶

Namun demikian, pengajaran tersebut memperlihatkan unsur kecenderungan politik Omar Dani. Pemberian pengajaran mengenai ajaran-ajaran presiden adalah suatu hal yang wajar, tetapi tidak demikian dengan marxisme, apalagi dengan upaya langsung mendatangkan orang-orang komunis ke AURI. Lebih lanjut, kepentingan pemahaman teori marxis dalam kursus staf sangat mungkin dimaksudkan sebagai bentuk pengenalan marxisme sebagai orientasi atau bahkan indoktrinasi politik sejak dini. Bagaimanapun, sewajarnya sekolah staf hanyalah mengupayakan lulusan yang memiliki kemampuan manajerial dengan mengikuti kebijakan negara, bukan disibukkan dengan teori sosial marxisme. Sangat wajar juga, jika kemudian hal tersebut menunjukkan kecenderungan AURI yang sedang dilanda virus komunisme.⁷

Adapun dukungan kepada kepemimpinan Presiden Sukarno, selain ditunjukkan dalam materi kursus Seskau juga diperlihatkan Omar Dani dalam berbagai kesempatan. Pada Hari Penerbangan Nasional tanggal 9 April 1965, Men/Pangau memerintahkan kepada segenap warga AURI agar melaksanakan secara konsekuen doktrin AURI yang dirumuskan pada seminar AURI tahun 1963, yaitu pada inti pelaksanaannya adalah sesuai dengan amanat dan ajaran-ajaran Presiden Sukarno.⁸ Pada peringatan Hari Ulang Tahun Pancasila 1 Juni 1965, Omar Dani

⁶ Omar Dani, *Op.Cit.*, hal. 36

⁷ John Hughes. *Indonesian Upheaval, A Report of a Coup that Misfired A Titan Who Fell*, (New York: Student Edition, 1967), hal.25-26.

⁸ *Angkasa* No.4, Tahun ke XV April 1965., hal 77, 78 dan 110

kembali menegaskan dihadapan warga AURI mengenai kewajiban warga AURI secara khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya untuk setia kepada negara dan Presiden Sukarno.⁹

3.2 AURI dan Konfrontasi Malaysia

Pada tahun 16 September 1963, Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara federasi. Presiden Sukarno, sejak 1961 mencurigai berdirinya negara federasi Malaysia sebagai usaha Inggris untuk menanamkan pengaruh jangka-panjang imperialisme di Asia-Tenggara. Pada 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pada 13 April 1964 didepan apel siaga sukarelawan, presiden mengucapkan Komando Aksi Sukarelawan yang terkenal dengan sebutan Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Isi Dwikora adalah: Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Sabah, Serawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.¹⁰

Dalam rangka politik konfrontasi dengan Malaysia, pada tingkat pusat dibentuk Komando Operasi Tertinggi (KOTI), dengan tugas melakukan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Untuk wilayah Indonesia bagian barat pada 16 Mei 1964 dibentuk Komando Gabungan yang bernama Komando Siaga. Panglima Siaga adalah Laksamana Madya Udara Omar Dani., yang memiliki Wakil Panglima terdiri dari: Laksamana Muda Laut Mulyadi dan Brigjen Achmad Wiranatakusumah. Sebagai Kepala Staf ditunjuk Kolonel Udara Leo

⁹ *Angkasa* No.6 Tahun XV DJuni 1965. hal 150-151 dan 175.

¹⁰ Saleh A. Djamhari, *Ichtisar Sedjarah Perdjjuangan ABRI (1945-Sekarang)*, (Pusat Sedjarah TNI, 1971), hal. 112.

Wattimena. Komando Siaga kemudian disempurnakan berdasarkan keputusan Presiden No. 2/KOTI/1965 menjadi Komando Mandala Siaga yang membawahi dua Komando Mandala, yakni Komando Mandala I dan II.

Dalam Komando Siaga, kepemimpinan Omar Dani seringkali tidak berjalan dengan harapan karena Angkatan Darat seringkali menjalankan kebijakan yang berbeda dengan kebijakan panglima. Mayjen Soeharto misalnya, melakukan penyusupan pangan ke Malaysia tanpa berkoordinasi dengan Omar Dani sebagai panglima.¹¹ Kemal Idris juga mengindahkan perintah komando untuk melakukan *infiltrasi*¹² Namun demikian, saat itu Omar Dani tidak mengambil suatu tindakan terhadap aksi tersebut.

Pembangkangan terhadap komando Omar Dani merupakan suatu petunjuk bahwa Angkatan Darat tidak sepenuhnya mendukung upaya Konfrontasi Malaysia. Dalam proses konfrontasi, Soeharto dan Nasution serta Angkatan Darat secara umumnya, justru melakukan upaya komunikasi dengan pihak-pihak tertentu di Malaysia.¹³ Mereka beranggapan bahwa konfrontasi adalah suatu langkah provokasi komunis untuk menarik dukungan masyarakat dan memperkeruh situasi politik regional, sehingga keberlangsungannya harus di hindari. Keikutsertaan Angkatan Darat dalam Konfrontasi Malaysia adalah suatu tindakan yang kontra-produktif, karena isu konfrontasi hanya menguatkan dukungan bagi kaum komunis yang menjadi pendukung politik gagasan tersebut.

¹¹ Omar Dani, *Tuhan Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku*, (Jakarta: ISAI, 1999), hal. 49-50

¹² Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hal 77-78.

¹³ *Ibid.*, hal. 79-80

3.3 AURI dan Angkatan Kelima

Definisi Angkatan Kelima adalah pentingnya pembentukan angkatan disamping empat angkatan yang sudah ada untuk memperkuat kekuatan personel dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Ada dua pendapat mengenai siapa yang memunculkan isu Angkatan Kelima. Pendapat pertama menyatakan bahwa isu ini adalah gagasan D.N Aidit, Ketua CC PKI. Pendapat ini berdasarkan keterangan bahwa pada bulan Januari 1965, Aidit mengusulkan kepada presiden agar kaum buruh dan tani dipersenjatai dan diberikan latihan-latihan kemiliteran.¹⁴ Aidit juga mengaggas bahwa rakyat yang dipersenjatai tersebut akan menjadi Angkatan Kelima, sederajat angkatan lainnya. Angkatan Kelima diperlukan sebagai bagian pertahanan Indonesia dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia.

Pendapat kedua, menyatakan isu Angkatan Kelima digagas Presiden Sukarno. Menurut Omar Dani, dalam acara pembukaan kursus Lemhanas di Istana Negara pada 20 Mei 1960, presiden menceritakan pertemuannya dengan Perdana Menteri RRC Chou En Lai, yang menjelaskan bahwa di RRC terdapat empat angkatan yaitu darat, laut, udara dan milisia.¹⁵ Presiden Sukarno kemudian bercerita bahwa di Indonesia juga terdapat sukarelawan yang dilatih dalam operasi Trikora dan Dwikora, tetapi kedudukan mereka belum tertampung dalam skema pertahanan nasional. Presiden selanjutnya menawarkan gagasan Angkatan Kelima sebagai wadah agar sukarelawan dapat dikontrol.

¹⁴ *Harian Rakjat* 15 Januari 1965. Dikutip dari *Ibid.* hal.105.

¹⁵ Omar Dani, *Op.Cit.*, hal.38.

Dari kedua pendapat diatas, pendapat pertama lebih kuat karena pidato DN Aidit dilakukan lebih dahulu dari pidato presiden. Selain itu, interpretasi Omar Dani terhadap pidato presiden adalah hal yang keliru. Dalam pidatonya, presiden menekankan pentingnya pertahanan nasional yang didasarkan atas pengetahuan geopolitik dan tidak menyebut secara jelas mengenai angkatan kelima.¹⁶

Untuk membahas isu angkatan kelima, presiden Sukarno kemudian mengadakan rapat dengan panglima keempat angkatan di Istana Negara. Dalam rapat tersebut, presiden menanyakan pendapat panglima angkatan-angkatan mengenai gagasan Angkatan Kelima. Diantara panglima angkatan, hanya Men/Pangau Omar Dani yang menyetujui usulan presiden. Men/Pangau Omar Dani merujuk keberadaan Angkatan Kelima pada skema bagan institusi Hankam, Komando Pertahanan Rakyat. Dalam otobiografinya, Omar menyamakan konsep Angkatan Kelima dengan konsep rakyat terlatih pada era reformasi. Dalam hal ini, Omar jelas keliru membandingkan keduanya. Rakyat terlatih diadakan sebatas mengamankan daerahnya, bukan seperti angkatan kelima yang dapat disebut sebagai militer tandingan karena memiliki senjata dan organisasi setingkat militer.

Adapun Angkatan Darat secara tegas menolak keberadaan angkatan kelima, karena menilai keberadaan empat angkatan yang ada sudah cukup. Selain itu, AD mencurigai isu Angkatan Kelima hanyalah merupakan sisat politik PKI untuk memperoleh kekuatan senjata.

¹⁶ *Bung Karno dan ABRI: Kumpulan pidato Bung Karno di hadapan ABRI 1950-1966*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hal. 113-129

Isu Angkatan Kelima, dalam pengertian sukarelawan Dwikora, kemudian melahirkan permasalahan lainnya, yakni dalih pemberian bantuan senjata RRC kepada Indonesia. Pada kunjungan Dr. Subandrio ke RRC bulan Januari 1965, Chou En Lai menawarkan bantuan 100.000 persenjataan ringan untuk kepentingan persenjataan rakyat. Adapun pengertian persenjataan rakyat, mengacu bukan angkatan bersenjata, melainkan sukarelawan Dwikora.¹⁷

Pada tanggal 16-19 September, Omar Dani dan Sri Mulyono Herlambang secara rahasia pergi ke Cina atas perintah Presiden Sukarno untuk membicarakan bantuan persenjataan RRC dan Indonesia kepada Pakistan.¹⁸ Secara tak terduga pemerintah RRC kembali menawarkan pemberian bantuan senjata ringan sejumlah 100.000 bagi kepentingan Angkatan Kelima seperti yang pernah ditawarkan Dr. Subandrio.¹⁹ Namun demikian, kepergian perwira tinggi AURI yang dilakukan tanpa sepengetahuan Nasution sebagai menteri pertahanan, mengundang tanda-tanya, apalagi kemudian juga membahas mengenai rencana bantuan senjata tersebut.

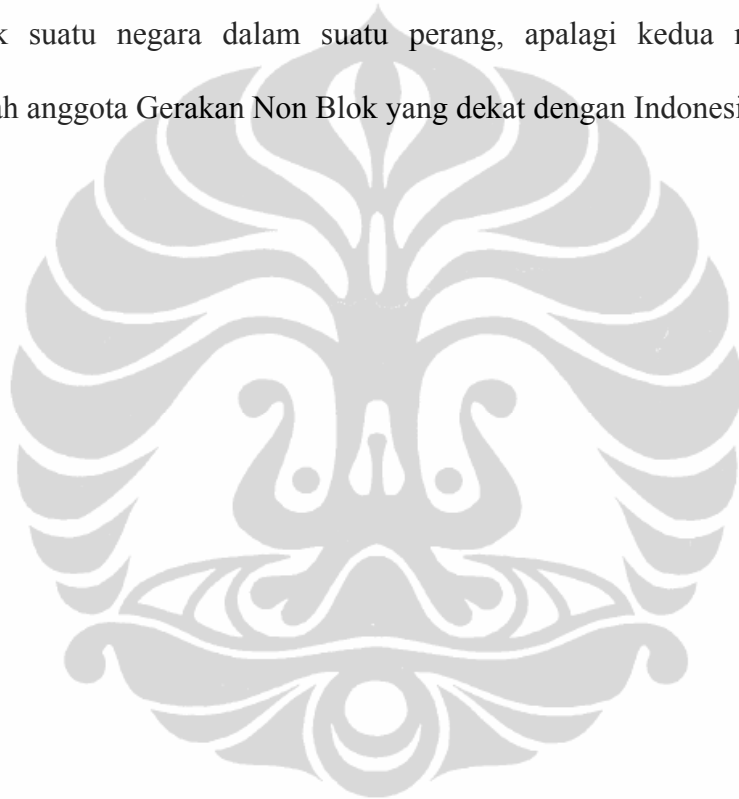
Sri Mulyono Herlambang menyatakan bahwa alasan utama kepergiannya ke RRC adalah untuk membicarakan bantuan kepada Pakistan. Pengiriman perwira AURI karena rencana pertemuan adalah untuk membahas bantuan *back-up* dan *spare part* pesawat terhadap Pakistan yang sedang berperang dengan India. Hal tersebut dilakukan karena sebelumnya AURI telah menjual pesawat MIG-19 kepada Pakistan

¹⁷ Kesaksian Suwito Kusumowidagdo (staf Menlu Adam Malik): *Mahmillub Dr. Subandrio*, hal.292.

¹⁸ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Jakarta: Serambi, 2000), hal.426

¹⁹ Brian May. *The Indonesian Tragedy*, (London: Routhledge & Kegan Paul, 1978), hal.94. Lihat juga Antonie Dake, *In the Spirit of the Red Banteng*, (Mouton: The Hague, 1973), hal 403-404.

dengan syarat AURI harus menyediakan *back-up* pesawatnya yang diproduksi RRC.²⁰ Tidak adanya pelaporan kepergian mereka ke RRC kepada Nasution, disebabkan karena misi tersebut diperintahkan secara langsung oleh Presiden Sukarno. Indonesia yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tentunya tidak dapat memihak suatu negara dalam suatu perang, apalagi kedua negara yang berperang adalah anggota Gerakan Non Blok yang dekat dengan Indonesia.



²⁰ Wawancara dengan Sri Mulyono Herlambang pada 27-05-2004; Omar Dani, *Op.Cit*, hal.

BAB IV

AURI DAN PERISTIWA G-30-S

Perkembangan peta politik Indonesia tidak pernah lepas dari dialektika kepentingan politik, dimana Presiden Sukarno menjadi tokoh yang dibutuhkan. Angkatan Darat membutuhkan Sukarno dalam menghadapi Demokrasi Parlementer, sedangkan PKI (serta PNI) membutuhkan Sukarno untuk melindungi kepentingan politik mereka. Berlakunya secara efektif Dekrit 5 Juli 1959, menandai dimulainya Demokrasi Terpimpin dengan berlakunya kembali UUD 45 sebagai dasar konstitusi negara. Dengan demikian partisipasi militer, yang dalam demokrasi parlementer dibatasi, mendapatkan ruang dalam UUD 45 lewat celah golongan fungsional.

Dalam pandangan Sukarno, angkatan Darat yang memiliki sifat anti-komunis, merupakan suatu unsur penghambat bagi langkah presiden menjalankan politik Nasakomnya yang berupaya mengakomodasi kepentingan politik komunis. Sehingga presiden seringkali mengingatkan agar para militer tidak bersifat komunistophobia. Presiden juga berusaha memindahkan perwira yang anti komunis dari jabatan komando kepada jabatan yang lebih bersifat staf administrasi, seperti yang dialami AH Nasution.

Pada pertengahan 1964, kondisi perpolitikan nasional semakin diliputi perasaan saling mencurigai. Penemuan dokumen rencana pemberontakan PKI oleh Partai Murba, rencana pembentukan Angkatan Kelima serta penemuan Dokumen Gilchrist yang isinya menjelaskan keberadaan operasi rahasia Nekolim untuk

menjatuhkan kekuasaan Presiden Sukarno merupakan berbagai macam persoalan yang memanaskan suhu politik nasional.

Penemuan Dokumen Gilchrist merupakan persoalan terpenting, bahkan dianggap sebagai faktor pemicu terjadinya peristiwa G-30-S pada 1 Oktober 1965. Dalam dokumen tersebut, tercantum kata *our local army friends* yang akan membantu operasi Neokolim menjatuhkan kekuasaan presiden. Kata-kata *our local army friends* ditafsirkan PKI sebagai kelompok Dewan Jenderal AD. Menanggapi tuduhan PKI, pihak AD melalui Jenderal Ahmad Yani menyatakan bahwa tidak ada Dewan Jenderal yang bersifat politik dan berencana merebut kekuasaan dari tangan presiden. Dewan Jenderal yang ada dalam AD hanya berfungsi sebagai dewan musyawarah dalam hal administratif yaitu pengangkatan pangkat perwira tinggi.¹

Memasuki tahun 1965, kesehatan Presiden Sukarno mulai memburuk. Ketika menghadiri suatu acara pertemuan di tanggal 15 Agustus, presiden mendadak jatuh sakit. Melihat merosotnya kesehatan presiden, Ketua Central Comitte (CC) PKI, D.N Aidit, kemudian mendatangkan Tim Dokter RRC untuk melakukan pemeriksaan kesehatan presiden. Dalam pemeriksaan tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa presiden mengalami gangguan ginjal. Dalam jangka waktu tidak terlalu lama, presiden diperkirakan akan lumpuh atau bahkan meninggal dunia.

Dalam komplikasi latar belakang di atas, pada 1 Oktober 1965 hadir satu gerakan yang mengatas-namakan keselamatan presiden yaitu Gerakan 30 September

¹ Kesaksian Sri Mulyono Herlambang: dalam *Dokumen G-30-S dihadapan Mahmilub 3 di Jakarta (Perkara Dr. Subandrio)*, (Pusat Pendidikan Kehakiman AD, Djakarta:1966), hal 118. Selanjutnya disebut Mahmilub Dr. Subandrio.

(G-30-S) yang melakukan pembunuhan terhadap tujuh perwira AD di Jakarta dan dua perwira AD di Yogyakarta. Ironisnya kelak, hasil peristiwa G-30-S justru meruntuhkan Presiden Sukarno dari tampuk kekuasaannya.

4.1 Peristiwa G-30-S

Sampai sekarang, peristiwa G-30-S masih menjadi pertanyaan besar dalam sejarah Indonesia. Bahkan seperti yang dikemukakan oleh penulis biografi politik Presiden Sukarno, J.D. Legge, bahwa “setiap penelitian mengenai peristiwa ini tampaknya hanya akan lebih banyak melahirkan pertanyaan, ketimbang jawaban”.² Adapun pelaku aktif dalam peristiwa G-30-S berjumlah enam orang, meliputi: Letnan Kolonel Untung (Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabirawa), Kolonel Latief (Komandan Brigade Infanteri I Jaya Sakti Kodam V Jaya), Sjam Kamaruzzaman (Biro khusus PKI), Pono (Staf CDB PKI Jawa-Tengah), Mayor Udara Soejono (Komandan Resimen Pertahanan Pangkalan AURI) dan Brigadir Jenderal Supardjo (Komandan Tempur Kostrad di Kalimantan Barat).³

Diantara mereka, mengaku baru saling mengenal ketika melakukan pertemuan pertama di rumah Kapten (AD) Wahyudi pada tanggal 17 Agustus

² J.D Legge, *Sukarno: Biografi Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hal 450-451.

³ Diantara empat orang militer, pangkat tertinggi adalah Brigadir Jenderal yaitu Supardjo, tiga orang lainnya adalah perwira menengah berpangkat antara Mayor dan Letnan Kolonel. Keberadaan Supardjo dengan pangkat Brigjen yang dalam G-30-S berada di bawah kedudukan Untung yang Letkol, adalah suatu hal yang dinilai John Roosa keanehan. Selain itu, Supardjo juga tidak pernah mengikuti rapat-rapat persiapan kelompok G-30-S dan hanya terlibat dalam G-30-S pada 1 hingga 3 Oktober 1965 saat aksi berlangsung. Lihat John Roosa, *Dalih Pembantaian Masal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hal.124

1965, yang dihadiri nama-nama di atas plus Wahyudi minus Brigjen Supardjo.⁴ Selanjutnya kelompok ini mengadakan pertemuan kembali sebanyak tujuh kali yang isinya adalah penyamaan pandangan politik berkisar situasi nasional, sakitnya presiden, pengamanan jalannya revolusi dan pemimpin besar revolusi serta adanya rencana kegiatan kudeta Dewan Jenderal terhadap kekuasaan presiden.⁵ Pada akhirnya kelompok ini memutuskan diperlukannya suatu usaha militer untuk menggagalkan gerakan Dewan Jenderal.

Pertemuan akhir yang diadakan pada tanggal 29 September pukul 10.00 pagi, diakhiri dengan *briefing* Kolonel Latief di Desa Lubang Buaya dengan para pemimpin kesatuan gerakan. Latief memberitahukan hari operasi adalah 1 Oktober 1965 dan jam operasi adalah pukul 04.00 dinihari. Setelah itu, Kapten Suradi melanjutkan *briefing* mengenai sektor-sektor dalam ibukota dan kekuatan bersenjata yang tersedia disetiap sektor, dilanjutkan *briefing* Letnan I Dul Arief mengenai pembagian pasukan pasopati, dan terakhir Soejono memberitahu mengenai nama-nama sandi dan simbol yang digunakan dalam gerakan.

Pada pukul 02.30 dinihari 1 Oktober 1965, pasukan penculik yang bersandi Pasopati, pimpinan Letnan I Dul Arief bersiap melakukan penculikan terhadap para Jenderal yang terdiri dari Jenderal A.H Nasution (Menko

⁴ Kesaksian Wahyudi (Kapten AD) dalam *Dokumen G-30-S dihadapan Mahmilub 2 di Jakarta (Perkara Untung)*, (Pusat Pendidikan Kehakiman AD, Djakarta:1966). hal 77-80. Selanjutnya disebut Mahmilub Untung.

⁵ Kesaksian Wahyudi dan Soejono dalam Mahmilub Untung, hal 77 dan 90. Terbukti isu Dewan Jenderal adalah keliru, karena saat penculikan anggota Dewan Jenderal, mereka dapat dengan mudah diamankan tanpa penjagaan. Hal ini merupakan keanehan bagi anggota kelompok aksi yang akan melancarkan kudeta.

Hankam/Kasab), Letjen Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen Suprpto (Deputi II Men/Pangad), Mayjen Haryono MT (Deputi III Men/Pangad), Mayjen S Parman (Asisten I Men/Pangad), Brigjen DI Panjaitan (Asisten IV Men/Pangad) dan Brigjen Sutoyo (Oditur Jenderal AD) untuk diserahkan kepada presiden.⁶

Operasi G-30-S kemudian berhasil menculik dan kemudian membunuh enam sasaran yang tertera dalam daftar, sementara Jenderal A.H Nasution berhasil meloloskan diri. Tiga orang jenderal ditembak mati ditempat, sedangkan tiga jenderal lain dan satu orang ajudan Nasution berhasil dibawa ke Desa Lubang Buaya dan kemudian dibunuh. Mayat korban G-30-S kemudian dikubur dalam sebuah sumur tua yang ditimbun tanah dan sampah daun-daunan kering.

Bersamaan dengan operasi penculikan para jenderal, G-30-S melakukan penguasaan tempat-tempat strategis di Ibukota Jakarta. Pada pukul 02.00 dinihari anggota Yon 530 bergerak dengan lima belas truk AURI untuk menduduki daerah sekitar Istana Merdeka. Pasukan ini ditempatkan sisi selatan Medan Merdeka. Sebelumnya Yon 454 telah berhasil menduduki sisi utara yaitu depan Istana Merdeka. Kekuatan militer ini juga menduduki Pos Telekomunikasi di Medan Merdeka Selatan dan RRI di Medan Merdeka Barat.

Tepat pukul 07.20 WIB tanggal 1 Oktober 1965, RRI menyiarkan pengumuman tentang adanya *Gerakan 30 September* di bawah komandan Letkol Untung, Komandan Batalyon I Resimen Tjkrabirawa. Komando G-30-S

⁶ Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *Tragedi Nasional Percobaan G-30-S/PKI di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hal. 14. Lihat juga <http://www.sejarah TNI.mil.id/index.php?cid=1973>.

menyatakan bahwa gerakan tersebut semata-mata gerakan internal AD terhadap Dewan Jenderal, yang anggota-anggotanya telah ditangkap, sedangkan Presiden Sukarno dalam keadaan selamat.⁷ Pada pukul 13.00 WIB, Komando G-30-S mengeluarkan Dekrit No. 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. Selanjutnya G-30-S menyiarkan dua buah keputusan penting, yaitu Keputusan No.1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia dan Keputusan No. 2 tentang penurunan dan kenaikan pangkat.⁸

Setelah menerima kabar penculikan para jenderal melalui laporan berbagai koleganya pada pagi 1 Oktober, Mayjen Soeharto menuju Markas Kostrad di Medan Merdeka Utara.⁹ Soeharto kemudian membicarakan situasi Jakarta dengan Pangdam V Jaya, Mayjen Umar Wirahadikusumah, serta melakukan koordinasi dengan jajaran perwira militer. Pada siang harinya, Soeharto memutuskan bahwa G-30-S adalah tindakan makar, AURI mendukung G-30-S serta Yon 454 dan 530 yang berada di area Medan Merdeka ikut terlibat dalam gerakan tersebut.

⁷ *Siaran RRI* pada 1 Oktober 1965.

⁸ Disamping komandan dan wakil komandan G-30-S, anggota Dewan Revolusi Indonesia berjumlah 45 orang, seperti nama-nama Mayjen Basuki Rachmat, Mayjen Umar Wirahadikusumah, Brigjen Amir Machmud, Fatah Jasin dan K.H.Siradjuddin Abbas. Untuk daftar lengkapnya lihat lampiran 1. Munculnya nama-nama orang komunis dijadikan alasan keterlibatan mereka, sedangkan adanya nama non-komunis hanya dianggap sebagai kelicikan orang komunis. Logika inilah yang menyebabkan tidak “diseretnya” seluruh nama-nama yang ada dalam daftar ke hadapan Mahmilub.

⁹ Sejak dinihari pasukan G-30-S menguasai daerah sekitar Istana, RRI dan Monumen Nasional, tetapi pasukan tersebut tidak ikut menguasai Markas Kostrad yang letaknya masih berada dalam satu *regio*. Lebih lanjut lihat Wertheim, *Suharto and the Untung Coup-the Missink Link*, *Journal of Contemporary Asia*, Vol 1 no.2, Winter 1970.

Mayjen Soeharto yang kemudian mengambil-alih pimpinan AD,¹⁰ berusaha membujuk pasukan Yon 530 dan Yon 454 yang berada di sekitar Medan Merdeka untuk segera menyerahkan diri. Yon 530 akhirnya menyerah dan bergabung ke Markas Kostrad, sedangkan Yon 454 bertahan hingga malam hari dan kemudian mengundurkan diri ke PAU Halim untuk menghadap presiden. Pada malam harinya, pasukan RPKAD tanpa melalui pertempuran berarti berhasil menguasai RRI dan Kantor Telekomunikasi. Kostrad juga membuat keputusan bahwa setiap surat bernada politik yang akan disiarkan RRI harus terlebih dahulu dilaporkan dan meminta persetujuan Dinas Penerangan AD (Dispenad). Pasukan Yon 454 yang mundur ke PAU Halim, kembali berhadapan dengan Pasukan Raiders (Para) 328/Kujang pada pukul 07.00 pagi. Siang harinya pasukan ini akhirnya menyerahkan diri.

Setelah berhasil menghancurkan kekuatan militer G-30-S di Jakarta, Soeharto mulai mengembangkan teorinya tentang keberadaan PKI sebagai pelaku utama G-30-S. Harian milik Angkatan Darat, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, merupakan alat kampanye AD untuk memberi informasi keterlibatan PKI dalam aksi G-30-S. Isu keterlibatan PKI ternyata cukup efektif dalam upaya menumbuhkan simpati dan dukungan kuat masyarakat. Dalam

¹⁰ Dalam kebiasaan AD, apabila Men/Pangad berhalangan hadir dalam suatu acara maka yang menggantikannya adalah Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto. Sebagai contoh, saat Men/Pangad Yani sedang melakukan misi ke luar negeri, maka Soeharto yang menggantikan Yani sebagai pimpinan AD. Sukarno sendiri mengangkat Mayjen Pranoto sebagai Men/Pangad carateker, tetapi pada akhirnya Sukarno mengakui kepemimpinan Mayjen Soeharto pada 1 November 1965 yang berlaku surut sejak 1 Oktober 1965. Lihat Keputusan No. 142/KOTI/1965.

waktu relatif singkat, gerakan militer Soeharto mendapat dukungan masyarakat sipil dengan adanya aksi-aksi demonstrasi mengutuk PKI. Nahdlatul Ulama (NU) pada 5 Oktober 1965 dan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu) pada tanggal 8 Oktober 1965 melakukan aksi demonstrasi menuntut pembubaran PKI. Aksi penghancuran G-30-S yang diarahkan kepada PKI terus menerus dilakukan militer maupun komunitas sipil hingga tahun 1967, dan bahkan mengarah kepada tindakan pembunuhan anggota dan kader-kader PKI. Robert Cribb berdasarkan pemaparan perkiraan dan penelitian beberapa peneliti, menyebutkan bahwa anggota PKI yang dibunuh berkisar antara jumlah 78.000 hingga dua juta jiwa.¹¹

Peristiwa G-30-S, kemudian melahirkan beragam interpretasi mengenai siapa yang menjadi dalang dalam peristiwa tersebut. Sampai saat ini setidaknya ada enam teori pelaku G-30-S, yakni teori: PKI, AD, Sukarno, Suharto, CIA serta kombinasi gerakan PKI-AD-CIA.

Teori yang menyebutkan PKI berada dibalik peristiwa tersebut, disampaikan Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Mereka menguraikan keterlibatan PKI lewat beberapa fakta. Pertama, *intensnya* Sjam dan Pono menghadiri rapat-rapat *pra* G-30-S. Kedua, adanya pelatihan kader PKI di bawah pengawasan Mayor (Udara) Soejono di Desa Lubang Buaya yang kelak beberapa komponen pelatihan turut serta dalam aksi G-30-S. Serta ketiga, kehadiran D.N

¹¹ Robert Cribb (ed), *The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2004), hal. 23-24.

Audit di Halim pada 1 Oktober 1965. Dari ketiga fakta ini ditarik kesimpulan, PKI menjadi aktor utama G-30-S.¹² Keterlibatan anggota ABRI dalam G-30-S, disebabkan keberhasilan penyusupan biro khusus PKI. Letkol Untung misalnya, diduga merupakan salah seorang perwira yang ikut terlibat dalam peristiwa Madiun serta merupakan anak didik Alimin, tokoh PKI.¹³

Teori kedua yang disusun oleh Benedict Anderson dan Mc Vey menyebutkan G-30-S adalah konflik internal AD. Latar belakang terjadinya gerakan tersebut ialah kesenjangan ekonomi yang mencolok antara perwira tinggi dan perwira menengah-bawah. Para perwira tinggi dianggap telah hidup bermewah-mewah dan tidak memikirkan nasib bawahan. Para perwira tinggi juga dianggap akan melakukan tindakan makar terhadap presiden sehingga dibutuhkan tindakan penyelamatan Presiden Sukarno. Versi ini disusun secara sosiologis dengan klaim fakta yang didasarkan berita-berita resmi kelompok G-30-S. Dengan demikian versi ini lebih memihak klaim kelompok G-30-S.

Teori ketiga adalah keterlibatan Presiden Sukarno dalam *intrik* ini. Versi yang dikemukakan Antonie Dake dan John Hughes, menunjukkan bahwa G-30-S adalah skenario yang dipersiapkan Presiden Sukarno untuk melenyapkan oposisi

¹² Lihat Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *Op.Cit.* serta buku Sekretariat Negara R.I, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1994).

¹³ Justus M. Van Der Kroef, *Indonesia Since Soekarno*, (Singapore: Asia Pasific Press, 1971), hal.10 ; Seharto, *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti yang dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan KH*, (Jakarta: Cipta Lamtoro Gung Persada, 1989, hal 119 & 121.

sebagian perwira AD.¹⁴ Versi ini terutama didasarkan keterangan Bambang Widjanarko, ajudan presiden, yang menyatakan presiden pernah meminta kesiapan Untung di Istana Tampak Siring, Bali, untuk mengamankan jenderal-jenderal yang tidak loyal. Pertanyaan serupa, kembali ditanyakan presiden kepada Men/Pangau Omar Dani dan Mayjen Mursyid.¹⁵ Bukti lain yang diajukan versi ini adalah kehadiran Presiden di Halim pada 1 Oktober. Versi ini menyatakan, PKI ikut terseret dalam G-30-S, karena amat bergantung pada Presiden Sukarno.

Keterlibatan CIA dalam G-30-S didasarkan analisa global bahwa G-30-S adalah bagian dari konsekuensi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Masing-masing pihak, memiliki kepentingan menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Melihat bahwa politik nasional Indonesia semakin mengarah kepada kelompok komunis, maka CIA berusaha lewat berbagai cara untuk menghancurkan Rezim Sukarno dan PKI. Diantaranya bantuan tersebut berupa pengucuran dana kepada KAP-Gestapu serta pemberian daftar-daftar nama yang harus dibersihkan. Kuat dugaan bahwa Soeharto menjadi kaki-tangan CIA. Wertheim menambahkan, Sjam yang disebut dalam *buku putih* sebagai kepala

¹⁴ Lihat Antonie Dake, *Op.Cit.*, ; John Hughes, *The End of Sukarno, A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*, (London: Angus & Robertson: 1967) serta Sugiarto Surojo, *Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai: G-30-S/PKI dan Peran Bung Karno*, (Jakarta: Intermasa, 1988). Dalam ketiga buku ini, digambarkan mengenai dugaan adanya keterlibatan Sukarno dalam G-30-S. Terutama didasarkan keterangan Widjanarko, konsepsi ideologi yang dianut Sukarno dan kehadiran Sukarno di Halim pada 1 Oktober. Selain hal itu, buku-buku ini tidak memiliki argumentasi fakta lebih jauh mengenai keterlibatan Sukarno.

¹⁵ Rahadi. S Karni (ed), *The Devious Dalang: Soekarno and the So-called Untung-Putsch Eye-Witnes report by Bambang S. Widjanarko*, (The Hague: 1974), hal.21

biro khusus C.C PKI adalah agen rangkap yang bekerja untuk Aidit dan AD. Versi ini diutarakan oleh Wertheim, Peter Dale Scott dan David T. Johnson.¹⁶

Sedangkan Teori Kelima yakni keterlibatan Soeharto dalam G-30-S, yang diutarakan Subandrio dan Latief. Subandrio melihat keterlibatan Soeharto dalam dua kategori, pertama menggunakan Latief-Untung dan kedua memakai Ali Moertopo-Yoga Soegama.¹⁷ Latief dan Untung dibiarkan untuk melakukan operasi terhadap para jenderal, hal inilah yang membuat Soeharto luput dari sasaran. Sedang Ali-Yoga dipakai untuk melakukan manuver dan operasi intelejen. Selain itu tidak dilupakan, bahwa para pelaku G-30-S memiliki ikatan emosional yang cukup kuat dengan Soeharto.¹⁸ Subandrio menyimpulkan, rangkaian peristiwa dari 1 Oktober hingga 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan lewat empat tahap. Pertama, menyingkirkan saingannya di AD seperti Ahmad Yani dan kawan-kawan. Kedua, membubarkan PKI sebagai rival berat tentara saat itu. Ketiga, melemahkan kekuatan pendukung Presiden dengan menangkap 15 menteri yang Pro-Sukarno. Tahap keempat,

¹⁶ W.F Wertheim, *Suharto and the Untung Coup-the Missink Link*, (Journal of Contemporary Asia, Vol 1 No.2, Winter 1970) ; Peter Dale Scott, *Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno*. Makalah tidak diterbitkan ; David T. Johnson, *Gestapu: The CIA's "Track Two" in Indonesia*, djohnson@cdi.org, original version, 1976),

¹⁷ Untung dan Latief merasa bahwa Soeharto adalah “kawan” dalam G-30-S. karena itu pada malam terjadinya gerakan, Latief mengaku sempat melaporkan rencana gerakan kepada Soeharto. Yoga ditarik menjadi intel Kostrad oleh Soeharto pada Januari 1965, ketika ia bertugas sebagai atase di Yugoslavia. Lihat Soebandrio, *Kesaksianku tentang G-30 S*, (Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001). lihat juga Wertheim, *Op. Cit.*, dan Abdul Latief, *Op. Cit.*, hal. 129.

¹⁸ Untung adalah bawahan Soeharto ketika di Divisi Diponegoro, Latief anak buah Soeharto ketika di Werkheise III Jogja, sedang Sjam adalah teman Soeharto dalam kelompok “Pathuk”. Sampai terjadinya G-30-S antara ketiga orang ini, masih menjalani hubungan baik dengan Soeharto. Bahkan Soeharto menghadiri acara perkawinan Latief disebuah kota kecil di Jawa-Tengah. Diantara tokoh-tokoh penting G-30-S, hanya Latief dan Heru Atmodjo yang tidak dihukum mati.

mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno. Versi ini mendapat kritikan tajam dari John Roosa, karena menurutnya Soeharto tidak memiliki kapasitas seorang jenius. Selain itu, ikatan emosional yang diajukan sebagai bukti klaim lebih didasarkan dugaan, bukan fakta yang memadai.¹⁹

Teori Keenam adalah teori yang disampaikan Sukarno pada pidato pelengkap Nawaksara pada 22 Juni 1966. Presiden Sukarno mengutarakan bahwa peristiwa G-30-S merupakan pertemuan dari tiga sebab, yakni keblingnya pimpinan PKI, kelihaihan subversi Nekolim, dan adanya oknum-oknum yang tidak benar.²⁰ Versi ini menekankan bahwa pihak yang diuntungkan dari G-30-S adalah pihak imperialis asing, sehingga penekanannya adalah pada Nekolim. Versi ini terlihat lebih masuk akal, apalagi versi yang selama ini beredar menyebutkan adanya keterlibatan ketiga unsur tersebut.

4.2 Pertemuan Halim, 1 Oktober 1965

Pada pukul 16.00 tanggal 30 September 1965, Men/Pangau Omar Dani mendapat laporan dari intelnya, Heru Atmodjo,²¹ bahwa pada malam hari akan diadakan sebuah gerakan internal AD yang dipimpin Brigjen Supardjo untuk

¹⁹ John Roosa, *Ibid*, hal. Asumsi John Roosa jelas keliru karena rentang waktu kekuasaan Soeharto selama 32 tahun menunjukkan kejeniusannya sebagai pemimpin. Keberhasilannya mengorganisir kekuatan kontra G-30-S dan melakukan serangan balik secara cepat (kurang dari 24 jam aksi G-30-S), menunjukkan kapasitas kemampuan berfikir dan inisiatif yang kuat dari Soeharto.

²⁰ Substansi isi pidato ini dikutip dari buku *Penerbitan MPRS Tahun 1967*, No. 5, Hal 25-31..

²¹ Letkol Penerbang Heru Atmodjo, alumnus pendidikan terbang Kalijati dan pernah ikut dalam penumpasan PRRI/Permesta. Saat terjadinya G-30-S menjabat sebagai Wakil Direktur Inteljejen AURI. Dalam daftar nama anggota Dewan Revolusi G-30-S, namanya tercantum dalam urutan Wakil Ketua Dewan Revolusi. Keberadaannya sebagai intel patut dicurigai, apalagi ia adalah satu-satunya perwira yang aktif dalam G-30-S tetapi tidak mendapat hukuman mati.

menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal. Gerakan militer tersebut akan dilakukan para perwira muda yang merasa tidak puas dengan keadaan AD, karena adanya kesenjangan ekonomi antara para jenderal dan perwira rendahan. Heru Atmodjo mendapatkan info ini berdasarkan pembicaraannya dengan Mayor (Udara) Soejono yang termasuk anggota kelompok Supardjo, pada dua jam sebelumnya.²²

Berdasarkan info Heru Atmodjo, Omar Dani memerintahkan Heru Atmodjo untuk mencari tahu lebih banyak mengenai rencana aksi dan melaporkannya malam itu juga. Sekitar pukul 22.00 WIB, Heru Atmodjo kembali ke Markas Besar AURI dan bertemu dengan beberapa perwira senior AURI untuk melaporkan apa yang diketahuinya dari Soejono.²³ Adapun perwira AURI yang hadir pada malam itu, antara lain: Deputy Men/Pangau Bidang Operasi (DMPO) Komodor Ignatius Dewanto, Deputy Men/Pangau Bidang Logistik (DMPL) Komodor Agustinus Andoko dan PangKoops Komodor Leo Wattimena.²⁴ Laksdya Makki Perdanakusumah yang secara kebetulan berkunjung ke Wisma Angkasa juga ikut mendengarkan *briefing*. Leo Wattimena sebagai Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Pangkalan AURI Halim menyarankan kepada

²² Wawancara dengan Heru Atmodjo 09-06-2004: Benedicta A. Surodjo dan JMV Soeparno, *Tuhan Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku, Pledoi Omar Dani*. (Jakarta: ISAI, 1999), hal.57. Heru Atmodjo berkeyakinan bahwa gerakan tersebut dipimpin oleh Brigjend Supardjo, mengingat Supardjo memiliki pangkat tertinggi dan kedudukan strategis dalam dinas militer diantara para pelaku gerakan. Saat terjadinya G-30-S, Supardjo bertugas sebagai Panglima Komandan Tempur (Pangkopur) Kostrad di Kalimantan-Barat dalam rangka operasi Dwikora. Keterangan ini dapat dilihat juga pada Hasil Mahmilub Untung ketika Omar Dani dimintai keterangannya sebagai saksi.

²³ Wawancara dengan Heru Atmodjo 09-06-2004. Lihat juga kesaksian Omar Dani dalam Mahmillub Dr. Subandrio.

²⁴ Omar Dani, *Op.Cit.*, hal 58.

Men/Pangau, apabila informasi intelejen terbukti benar, maka Men/Pangau hendaknya berjaga-jaga dan bermalam di Pangkalan AURI Halim. Akhirnya Omar Dani menerima saran tersebut. Lewat tengah malam, Men/Pangau mengajak ajudannya pergi ke Markas Koops Halim. Setelah tiba di Halim, karena kelelahan, Omar Dani langsung beristirahat hingga dibangunkan Pukul 06.00 pagi harinya.²⁵

Sebagai pemimpin, Omar Dani memiliki jalur koordinasi yang baik dengan bawahannya, seperti adanya kemudahan mendapatkan berita-berita terbaru mengenai informasi gerakan. Namun, sebagai Men/Pangau Omar Dani tidak berusaha melaporkan informasi intelnya yang demikian penting kepada presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Seakan-akan Omar Dani ingin menyimpan rapi rahasia tersebut dikalangan AURI atau demi kepentingan tertentu.

Adapun keberadaan Untung, Latief dan Sjam, sebagai pemimpin G-30-S, sejak malam hingga saat presiden berada di Pangkalan AURI Halim, berada di Penas. Kemudian baru pada pagi harinya, mereka pindah ke rumah Sersan (Udara) Anis Sujatno yang terletak di wilayah Halim. Ketika berada di rumah Anis Sujatno, aktivitas mereka lebih ditujukan untuk beristirahat dan sedikit berdiskusi mengenai perkembangan gerakan. D.N Aidit, Ketua CC PKI sebagai orang yang diduga dalang G-30-S, berada di Halim sejak malam 1 Oktober dan

²⁵ *Ibid.*, hal. 59-60 dan 65.

langsung berkedudukan di rumah Sersan dua Suwardi.²⁶ Aktivitas D.N Aidit ketika berada di Halim tidak begitu jelas, apalagi kemudian ia dibunuh sebelum memberi kesaksian di pengadilan.²⁷

Ternyata laporan Heru Atmodjo benar-benar menjadi kenyataan. Omar Dani teringat saran Heru Atmodjo, apabila operasi yang dilaporkan benar-benar terjadi, maka hendaknya Men/Pangau membuat surat pernyataan. Dengan segera Omar Dani membuat surat pernyataan berdasarkan informasi sebelumnya, dengan kepercayaan bahwa suatu gerakan yang bertujuan mengamankan presiden dan kewibawaannya haruslah didukung.²⁸ Karena G-30-S, seperti yang diklaim Untung, adalah sebuah gerakan penyelamatan presiden maka surat pernyataan AURI bersifat mendukung G-30-S. Setelah dikoordinasikan dengan Pangkoops Leo Wattimena dan DMPO Ignatius Dewanto maka surat tersebut dikirim untuk disiarkan lewat RRI.

Sekitar pukul 08.00 WIB, Omar Dani mendapat kabar dari ajudan presiden, Letkol Suparto, bahwa presiden akan pergi ke Pangkalan AURI Halim. Kepergian Presiden Sukarno ke Halim didasarkan kepada tidak menentukannya situasi di Jakarta, terutama setelah presiden Sukarno menerima laporan adanya

²⁶ Tidak begitu jelas mengenai kedatangan Aidit ke Halim serta hal yang mendorongnya kesana. Justus Van Der Kroef, berdasarkan keterangan istri Aidit menyebutkan bahwa kepergian Aidit ke Halim adalah karena diculik kelompok Untung. lihat Justus M. Van Der Kroef, *Op.Cit.*, hal.13; David T. Johnson, *Op.Cit.*, hal.11. Namun demikian, keterangan Kroef tidak berdasar bukti apapun. Apabila Aidit di culik, maka ia tidak ditemani tokoh PKI lainnya, yaitu Iskandar Subekti dan Munir.

²⁷ Penghilangan “jejak” Aidit dimungkinkan sebagai upaya untuk mengubur kejelasan G-30-S, mungkin juga hal ini dilakukan oleh pihak tertentu yang apabila Aidit dibiarkan berbicara maka akan membuka tabir rahasia yang lebih besar.

²⁸ Omar Dani, *Op.Cit.*, hal.66. Pembahasan lebih lanjut mengenai surat pernyataan Omar, lihat pada Bab V tentang akhir kepemimpinan Omar Dani.

penembakan dan penculikan di beberapa rumah perwira tinggi AD. Berdasarkan doktrin Tjakrabirawa, apabila keamanan presiden terancam, maka presiden harus segera diselamatkan ke area yang aman. Menurut keterangan Maulwi Saelan, Wakil Komandan Tjakrabirawa yang saat itu bersama presiden, kedatangan Presiden Sukarno ke PAU Halim adalah semata berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP). Sesuai SOP, terdapat dua pilihan pengamanan presiden yaitu PAU Halim yang terdapat pesawat khusus kepresidenan *Jetstar C-140*, serta Tanjung Priok yang terdapat kapal kepresidenan R.I *Varuna*.²⁹ Akhirnya presiden memilih pergi ke PAU Halim, karena disana terdapat Men/Pangau Omar Dani yang loyalitasnya terhadap presiden tidak diragukan.

Presiden berangkat dari rumah Harjati pukul 08.30 WIB dan tiba di Pangkalan AURI Halim pada pukul 09.30 WIB. Kedatangan presiden disambut oleh Men/Pangau Omar Dani dan Komodor Leo yang didampingi oleh perwira intelejen. Presiden kemudian beristirahat di rumah Komodor Soesanto. Brigjen Supardjo yang sejak pagi hari mencari presiden di Istana, dengan ditemani Heru Atmodjo tiba di Halim pada pukul 10.30 menggunakan helikopter AURI. Setelah meminta izin Men/Pangau, Supardjo kemudian berhasil menemui presiden dalam sebuah kamar di rumah Komodor Soesanto dan menceritakan seputar kejadian 1 Oktober. Brigjen Supardjo juga meminta dukungan presiden terhadap aksi G-30-S. Presiden menolak memberi dukungan dan kemudian memberi perintah agar

²⁹ Maulwi Saelan, *Dari Revolusi '45 sampai kudeta '66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa*, (Jakarta: Yayasan Hak Bangsa, 2001), hal.311

Supardjo dengan segera mengakhiri gerakan serta menghimbau agar tidak terjadi pertumpahan darah.

Presiden kemudian memerintahkan Komisararis Besar (Kombes) Polisi. Soemirat untuk memanggil Men/Pangal Laksamana Madya Laut R.E Martadinata, Men/Pangak Inspektur Jenderal Pol. Soetjipto Joedodihardjo, Pangdam V/Jaya Mayjen Umar Wirahadikusuma dan Jaksa Agung Brigjen Sutardio. Wakil perdana menteri yang dipanggil hanya Dr. Leimena (Waperdam II).³⁰ Pukul 12.00, Dr Leimena tiba di PAU Halim dengan pesawat helikopter *syorsky* kepresidenan. Kemudian pukul 13.00 tiba di Pangkalan AURI Halim, Laksdya Laut RE. Martadinata, Jaksa Agung Brigjen Soetardio dan Inspektur Soetjipto dengan menggunakan helikopter ALRI. Satu-satunya undangan yang tidak hadir ialah Umar Wirahadikusumah, karena dilarang Soeharto.

Selama di Pangkalan AURI Halim, Presiden Sukarno menerima berbagai informasi mengenai perkembangan situasi nasional terutama yang terjadi di Jakarta. Ketika presiden mendengar kabar terbunuhnya Letjen Ahmad Yani, maka presiden segera bermusyawarah dengan undangan yang ada dan kemudian menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamodra sebagai pejabat carateker Men/Pangad, tetapi pelaksana sehari-hari dipegang Pangkostrad. Presiden kemudian memerintahkan Men/Pangal Martadinata memanggil Mayjen Pranoto menghadap ke Pangkalan AURI Halim. Namun, Mayjen Pranoto tidak pernah datang, karena

³⁰ Dr Subandrio yang menjabat Waperdam I saat itu sedang mengadakan kunjungan ke Medan. Sedangkan Chaerul Saleh sebagai Waperdam III, sedang memimpin perutusan MPRS ke RRC.

dilarang oleh panglima Kostrad, Mayjen Soeharto yang tidak mau mengambil resiko kemungkinan bertambahnya korban jenderal AD. Setelah Pranoto tidak datang, lewat Kolonel Widjanarko, Soeharto menyarankan agar Presiden Sukarno keluar dari Pangkalan AURI Halim. Hal itu dilaporkan kepada Dr. Leimena pada pukul 21.00 dan Leimena pun sependapat dengan saran Soeharto. Brigjen Sabur juga mendapat telepon dari Kostrad untuk membawa Presiden Sukarno keluar Pangkalan AURI Halim.

Setelah Presiden Sukarno berdiskusi dengan Men/Pangau Omar Dani, dengan berbagai pertimbangan akhirnya presiden bersedia keluar dari Pangkalan AURI Halim menuju ke Istana Bogor. Pilihan daerah tujuan Istana Bogor adalah atas pertimbangan dari Leimena, bahwa di Bogor kondisi cukup strategis. Selain dekat dengan pusat pemerintahan Jakarta, Kota Bogor dinilai relatif aman karena terdapat helikopter dan perlindungan Pangdam Siliwangi, Ibrahim Adjie yang dapat dipercaya.³¹ Pada pukul 22.00 WIB, Presiden Sukarno dengan menggunakan mobil berangkat ke Istana Bogor. Pada pukul 24.00 WIB, Menteri Koordinator D.N Aidit terbang ke Yogyakarta diikuti Bridgjen Supardjo yang juga terbang ke Madiun. Omar Dani sendiri memutuskan pergi ke Madiun, sekaligus melakukan pemantauan udara bersama komodor Leo Wattimena.

³¹ Ibrahim Adjie adalah salah seorang perwira yang Pro-Sukarno, tetapi ia anti komunis. Ia kurang begitu disukai Nasution karena kedekatannya dengan Sukarno. Terlebih lagi karena Adjie pernah menceraikan isterinya dan kemudian menikah kembali dengan perempuan Yugoslavia. Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal.266-267

Pasca peristiwa di Pangkalan AURI Halim, muncul dugaan bahwa keberadaan Presiden Sukarno, Supardjo, D.N Aidit dan Omar Dani sebagai keterlibatan mereka dalam G-30-S. Presiden sendiri membantah adanya isu ini dalam siaran R.R.I pada tanggal 3 Oktober 1965:

“ Kepergian saya ke Pangkalan Angkatan Udara Halim pada tanggal 1 Oktober pagi-pagi, adalah atas kehendak saya sendiri. Karena saya berpendapat bahwa tempat jang terbaik bagiku, ialah tempat dekat kapal udara jang dapat mengangkut saya tiap saat ketempat lain, kalau terdjadi sesuatu jang tak diharapkan ”³²

Menurut Omar Dani, kedatangannya ke Pangkalan AURI Halim, bukan karena keterlibatannya dalam kelompok G-30-S melainkan karena tanggung jawabnya sebagai Men/Pangau untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang diterimanya dari Letkol Heru Atmodjo. Namun, Omar seakan tidak menyadari adanya implikasi logis bahwa keberadaannya di dekat pelaku G-30-S hanya akan membangun opini keterlibatannya dalam G-30-S. Selain itu, tindakan Omar yang mengirimkan helikopter untuk menjemput Supardjo dan Heru Atmodjo di Istana Merdeka adalah suatu tanggung jawab yang berlebihan dalam kapasitasnya sebagai Men/Pangau. Saat berada di Pangkalan AURI Halim, Omar Dani juga menjadi penghubung dalam pertemuan antara Presiden Sukarno dan perwakilan kelompok G-30-S, Brigjen Supardjo.

Namun, kedatangan Presiden Sukarno ke Pangkalan AURI Halim, bukan didasarkan permintaan Men/Pangau Omar Dani, tetapi berdasarkan SOP dan

³² ANRI. Amanat JPM Presiden Sukarno kepada seluruh rakjat Indonesia berhubung dengan peristiwa Gerakan 30 September. Lihat lampiran 2

keinginan presiden sendiri. Menurut Omar Dani, pertemuannya dengan Supardjo, juga disebabkan karena perwakilan kelompok G-30-S ingin menghadap presiden, sehingga secara prosedural, tamu yang datang diwajibkan untuk melapor terlebih dahulu. Walaupun demikian, kehadiran Omar Dani di Pangkalan AURI Halim, disadari atau tidak, telah dimanfaatkan oleh kelompok Untung untuk memberi kesan dukungan panglima AURI dalam G-30-S.³³

Keberadaan D.N Aidit, Ketua CC. PKI yang disebut-sebut sebagai dalang G-30-S di Pangkalan AURI Halim pada 1 Oktober tidak berkaitan dengan AURI. Walaupun Aidit berada di Halim, tetapi tidak ada ketidakjelasan mengenai aktivitas Aidit terhadap perwira AURI. Hal ini tentunya mengundang praduga, adanya rekayasa untuk memposisikan Aidit di Pangkalan AURI Halim, untuk menimbulkan kesan bahwa AURI yang memberikan fasilitas. Menurut Omar Dani, kepergian DN. Aidit dari Pangkalan AURI Halim ke Yogyakarta dengan pesawat terbang AURI, bukan karena AURI terlibat dalam G-30-S melainkan karena kedudukannya sebagai Menteri Koordinator.³⁴ Namun, mengapa kepergian Menko yang difasilitasi AURI terjadi pada saat kegagalan G-30-S dan tidak bersama dengan menteri lainnya. Padahal Menko atau menteri yang perlu

³³ Benedict R. Anderson and Ruth T. Mc Vey. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia*, (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University Press, 1971), hal. 19. *Cornell Paper* lebih jauh mengatakan bahwa Omar diculik bukan pergi, tetapi hal ini sangat bertentangan dengan keterangan dalam biografinya serta pengakuan Omar di depan Mahmilub.

³⁴ Wisnu Djajengminardo, *Saya Srigala Terbesar dari Halim*, Tempo, 20 Juni 1999; Wawancara Sri Mulyono Herlambang 27-05-2004.

mendapatkan rasa aman tidak hanya DN. Aidit. Tentunya hal ini tidak dapat dijawab Omar.

Namun, pengkaitan keempat tokoh nasional di Pangkalan AURI Halim dengan G-30-S sebagai suatu komplotan dan berada pada tempat yang sama juga merupakan suatu kekeliruan.³⁵ Diantara mereka berada pada tempat berbeda dan tidak bertemu satu sama lain. Tokoh G-30-S berkumpul di Gedung Penas, Presiden Sukarno beserta pengikutnya berada di rumah Direktur Operasi AURI, Komodor Udara Susanto dalam Pangkalan AURI Halim, sedangkan DN. Aidit berada di rumah Sersan Dua Suwardi. Praktis tokoh G-30-S yang bertemu dengan presiden hanyalah Brigjen Supardjo. Apabila antara keduanya berkomplot, maka menjadi hal yang aneh ketika pada pagi harinya Supardjo menyiapkan waktu yang penting untuk mencari dan melapor kepada presiden di Istana. Sikap penolakan Presiden Sukarno untuk ikut mendukung gerakan Supardjo, juga membuktikan tidak adanya konspirasi di Pangkalan AURI Halim.

Tabel 1
Posisi Keberadaan Tokoh Nasional di Halim pada 1 Oktober 1965

Tempat 1 <i>Penas</i>	Tempat 2 <i>Rumah Sersan Suwardi</i>
Latief, Untung dan Sjam	Menko D.N Aidit, Iskandar Subekti, Munir

³⁵ Sebagai contoh lihat uraian Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno, Ideologi and Politics 1959-1965*, (London: Cornell University Press, 1974), hal. 414.

Tempat 3 <i>Rumah Komodor Susanto</i>
Presiden Sukarno, Omar Dani, Supardjo, Martadinata, Leimena Dll.

Sumber:

Diolah oleh peneliti dari Katoppo (2000), Sekretariat Negara (1995), Omar Dani (2000) dan John Roosa (2008)

Namun demikian, keluarnya Presiden Sukarno dari Pangkalan AURI Halim ke Istana Bogor didasarkan karena adanya ancaman Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto. Sejak 1 Oktober 1965, panglima Kostrad menjadikan lembaganya bersifat otonom dan tidak menaati kebijakan presiden. Hal ini tampak dari penolakan Soeharto atas undangan presiden agar Mayjen Pranoto dan Umar Wirahadikusumah datang ke Pangkalan AURI Halim. Soeharto bahkan mengeluarkan isi pesan yang bernada ancaman terhadap Presiden, agar presiden segera keluar dari pangkalan udara Halim karena berada “ditempat yang salah” dan Halim akan segera diserbu. Presiden sendiri kemudian pergi ke Bogor dengan menggunakan Jeep, suatu hal yang menunjukkan ketidakberdayaannya. Karena apabila disesuaikan dengan prosedur SOP, maka seharusnya presiden diangkut menggunakan pesawat udara.

4.3 Halim, 2 Oktober

Setelah Presiden Sukarno keluar dari Pangkalan AURI Halim, AD menilai bahwa sisa kekuatan G-30-S masih berkumpul di Pangkalan AURI Halim. Kekhawatiran AD semakin diperkuat dengan munculnya isu rencana pengeboman

AURI terhadap Kostrad, sehingga Mayjen Soeharto memindahkan untuk sementara Markas Kostrad ke Senayan. Ternyata serangan udara tersebut tidak pernah terjadi. Namun, adanya isu ancaman tersebut mengakibatkan persiapan-persiapan Suharto tertunda beberapa jam.³⁶

Pada pukul 02.00 WIB tanggal 2 Oktober, Panglima Kostrad yang telah mengambil alih kepemimpinan AD memerintahkan Komandan RPKAD, Kol. Sarwo Edhie, untuk menguasai Pangkalan AURI Halim dan memastikan kekalahan G-30-S. Mayjen Suharto memberi pesan singkat agar Sarwo Edhie menghindari terjadinya pertumpahan darah dan kerusakan material. Mayor C.I Santoso, Komandan Rayon I/RPKAD yang mendapat perintah tugas operasional, kemudian mengadakan *briefing* bersama kompi-kompi yang ikut didalamnya untuk menjelaskan sasaran operasi dan pesan pangkostrad di atas. Menjelang pukul 05.30 WIB, setiap komandan kompi telah siap bergerak masuk ke PAU Halim sambil menunggu komando.

Keberadaan pasukan RPKAD di sekitar PAU Halim telah diketahui staf PGT sejak pukul 05.30 WIB. Jarak antara penjagaan PGT dengan RPKAD hanya \pm 150 meter. Men/Pangau Omar Dani yang mengetahui informasi tersebut, segera memerintahkan Panglima Koops AURI, Komodor Leo Wattimena agar membuat

³⁶ Serangan udara tersebut sempat menjadi pembicaraan tokoh G-30-S di Halim. Hal ini merupakan saran yang dilontarkan Brigjen Supardjo, karena hanya bantuan AURI lah satu-satunya jalan yang dapat memenangkan kelompok G-30-S. Namun, ternyata Omar Dani tidak pernah melakukan pengeboman yang diinginkan. Hal ini juga menandakan bahwa AURI memang tidak terlibat dalam aksi G-30-S sebagaimana direncanakan oleh kelompok Untung. Lebih lanjut Lihat John Roosa, *Ibid*, hal 83 dan perhatikan juga uraian lengkap kritik Supardjo pada bagian lampiran buku roosa tersebut.

radiogram ke Pangkalan AURI Halim untuk selanjutnya diteruskan kepada Mayjen Soeharto. Inti dari radiogram yang dimaksud ialah agar pasukan AD jangan masuk ke Halim, karena di Pangkalan AURI Halim tidak ada Brigjen Supardjo. Namun isi radiogram yang dikirim Leo bernada agak berbeda yaitu “Angkatan Darat jangan masuk ke Halim, kalau masuk akan dihadapi”. Isi dari radiogram, menimbulkan kesan bahwa AURI telah siap untuk berhadapan secara fisik dengan AD.³⁷

Tepat pukul 06.00 WIB pasukan RPKAD mulai masuk ke Pangkalan AURI Halim. Pasukan tersebut langsung menduduki sasaran seperti yang diperintahkan dalam *briefing*. Pasukan RPKAD yang memasuki Skuadron-31, tidak mendapatkan perlawanan dari AURI. Satu-satunya insiden terjadi di depo perminyakan, saat pasukan RPKAD menembak mati dua orang perwira AURI yang hendak mengambil senjata yang tidak disandangnya. Sementara pasukan RPKAD menguasai Halim, satu kompi Yon 328/Para melakukan *stelling* didekat PN Intirub, melucuti senjata anggota AURI yang keluar masuk pangkalan.³⁸

Saat seluruh kompi Yon-1/RPKAD di PAU Halim melakukan konsolidasi, menjelang pukul 10.00 Kolonel Sarwo Edhi mengirim berita lewat radio kepada Mayor C.I Santoso bahwa ia akan masuk ke Halim menemui presiden. Mayor C.I Santoso menyarankan agar komandan RPKAD masuk lewat Klender kearah

³⁷ Aristides Katoppo., et.al., *Menyingkap Kabut Halim 1965*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hal. 151. Ashadi Tjahjadi menyebutkan bahwa telegram ini dikeluarkan oleh Leo dari Malang tanpa sepengetahuan Omar Dani. Lihat. Imran Hasibuan dkk, *Loyalitas Tanpa Pamrih: Biografi Marsekal (Purn) Ashadi Tjahjadi*, (Jakarta: Q Communication dan Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 117.

³⁸ Aristides Katoppo., *Ibid.*, hal. 154

Pondok Gede. Karena jalur Pondok Gede-Halim belum diamankan, maka ia memerintahkan Kompi Kajat/Cadangan dan Kompi-B-Yonkav-1/Panser Kostrad RPKAD yang berada di sekitar PN Intirub untuk mengawal. Kekhawatiran Mayor C.I Santoso ternyata benar. Ketika melintasi arah *dropping zone* Lubang Buaya, pecah pertempuran dengan Yon 454/ Raiders/Diponegoro di bawah pimpinan Kapten Koentjoro. Dalam pertempuran tersebut, seorang anggota kompi cadangan yang mengawal Sarwo Edhi gugur.

Deputi Operasi Men/Pangau, Komodor Dewanto dan perwira intelejen AURI, Kapten (Udara) Kundimang yang berada dihanggar skatek ketika mendengar suara tembakan, segera berinisiatif untuk menyelamatkan Pangkalan AURI Halim dari kehancuran. Kedua perwira tersebut, memberanikan diri menjadi penengah antara pasukan AD yang sedang bertempur. Proses mediasi yang mereka lakukan akhirnya berhasil, pertempuran berhenti sesudah diadakan pertemuan antar komandan. Kapten Kuntjoro beserta pasukannya kemudian mengundurkan diri dari Halim menuju ke Senayan sekitar pukul 06.30 WIB 3 Oktober. Setelah tiba di Senayan, mereka lalu ditahan di stadion utama. Dua puluh anggota Yon 454/Raiders lainnya yang berusaha melarikan diri ke Jawa-Tengah berhasil ditangkap Kompi Ramelan, Yon-1/RPKAD. Sedangkan 97 anggota Yon 454/Raiders dan 140 anggota Yon 530/Raiders, ditangkap dalam

pengejaran satu kompi Yon 203 Kodam V Djadja dan Kavaleri Yonkav-7/Panser Kostrad.³⁹

Uraian kronologi diatas menunjukkan, tidak adanya campur-tangan AURI dalam pertempuran di Pangkalan AURI Halim. AURI memang melakukan gertakan kepada RPKAD untuk tidak masuk ke PAU Halim, tetapi gertakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi instalasi AURI bukan karena dukungannya terhadap G-30-S. Justru dalam pertempuran antara kekuatan Kostrad dan G-30-S, AURI bertindak sebagai penengah.

Namun, surat gertakan yang dibuat oleh Leo Wattimena menarik untuk dipertanyakan. Surat yang awalnya adalah perintah Omar Dani untuk melindungi Pangkalan AURI Halim, diterjemahkan Leo Wattimena dalam bahasa gertakan. Hal yang aneh ialah pada tengah hari 1 Oktober sebelum Pangkalan AURI Halim diserang RPKAD, Leo bertemu dengan Soeharto di Markas Kostrad. Dalam pertemuan tersebut Leo memberitahukan sikap AURI seperti yang dijelaskan dalam briefing malam 30 September, sedangkan Soeharto memberikan pengarahan bahwa pusat komando pimpinan G-30-S berada di pangkalan AURI Halim, pimpinan G-30-S terdapat oknum AURI dan Halim sebelumnya telah dijadikan tempat latihan Pemuda Rakyat.⁴⁰ Didepan Soeharto, Leo mengiyakan pengarahan Soeharto. Dengan demikian, terdapat suatu keganjilan bahwa Leo

³⁹ *Ibid.*, hal. 156-176

⁴⁰ Soeharto, *Op.Cit.*, hal. 122-124.

yang menyatakan persetujuannya dengan Soeharto, juga adalah yang membuat surat untuk menggertak pasukan Soeharto.⁴¹

4.4 Daerah Lubang Buaya.

Lubang Buaya yang berada di pinggir tenggara kota Jakarta, dikenal sebagai tempat dikuburkannya para jenderal secara paksa dalam peristiwa G-30-S. Lubang Buaya juga merupakan tempat pelatihan para sukarelawan dan sukarelawati yang kelak pada 1 Oktober 1965 menjadi tenaga operasi "pembersihan" para jenderal Angkatan Darat. Keberadaan Lubang Buaya yang berada di pinggiran kota dan belum terdapat hunian yang padat, merupakan pilihan yang tepat untuk merencanakan suatu kegiatan rahasia. Letaknya yang berada didekat pangkalan udara Halim menyamarkan keberadaan letak tempat tersebut, sehingga keberadaannya sering disangkut-pautkan dengan AURI.

Dilihat dari sudut geografis Halim, maka Desa Lubang Buaya tempat beradanya sumur maut, terletak di luar batas Pangkalan AURI Halim. Lubang Buaya yang dimaksud, kalau ditarik lurus berjarak tiga setengah kilometer dari Markas Koops yang berada di PAU Halim Perdanakusumah. Letaknya berada diluar zona kekuasaan AURI yang dipisahkan oleh jalan raya Pondok Gede dengan Halim dan berada di dalam wilayah administratif Desa Lubang Buaya,

⁴¹ Menarik untuk dicermati bahwa pasca G-30-S, Leo yang loyal kepada Omar Dani dan mengetahui seputar Peristiwa Halim 1 Oktober, tidak ikut disingkirkan oleh Soeharto seperti para perwira AURI lainnya. Leo terus berdinasi di AURI hingga menikmati pensiun setelah mengundurkan diri secara wajar. Karier terakhirnya adalah duta besar R.I di Roma.

kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa-Barat.⁴² Di Pangkalan AURI Halim memang terdapat daerah Lubang Buaya, tetapi area tersebut adalah tempat latihan penerjunan (*dropping zone*) dan secara geografis keduanya adalah tempat yang berbeda.

Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto adalah tokoh yang sedari awal menyebutkan keberadaan Lubang Buaya tempat mayat jenderal dikubur sebagai daerah AURI. Pengaburan fakta ini dinyatakan Soeharto dalam kesempatan pemberian pidato sambutan pada saat penemuan dan penggalian korban Jenderal pada 4 Oktober 1965. Soeharto dengan mengenakan kacamata hitam, mengatakan:

“Kalau kita lihat tempat ini, adalah di Lobang Buaya. **Daerah Lobang Buaya adalah termasuk dari daerah Lapangan Halim.** Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta, bahwa dekat pada sumur ini, telah menjadi pusat daripada latihan sukwan dan sukwati, jang dilakukan atau dilaksanakan oleh A.U”⁴³

Tentunya, pernyataan Soeharto ini tidak berdasar karena ia tidak melakukan pengecekan ulang keberadaan wilayah Lubang Buaya. Keganjilan lain, ketidaktahuan Soeharto juga merupakan tanda-tanya, karena Desa Lubang Buaya tempat para jenderal dikuburkan, pada tanggal 5 Juli 1965 sebelumnya

⁴² Berdasarkan peta Jakarta 1965, tidak terdapat kecamatan Pondok Gede. Rincian mengenai daerah Halim tidak dapat peneliti temukan hingga tesis, walaupun telah dilakukan pencarian data Ke Badan Pertanahan Nasional (baik pusat maupun wilayah Jakarta), Lembaga Informasi Nasional Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanahan setempat (Jakarta dan Jakarta-Timur). Satu-satunya peta berharga untuk menjelaskan secara *scientific* adalah data dari AURI yang kemudian dijadikan lampiran dalam buku Aristides dkk. Selain sumber AURI, kajian John Roosa, *Dalih Pembunuhan Masal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2008) juga melampirkan peta Halim. Untuk lebih jelasnya perhatikan peta daerah Halim pada lampiran 3.

⁴³ Lihat Lampiran 4. Cetak tebal dari peneliti

telah digunakan sebagai tempat upacara pemindahan pasukan Siliwangi dan Brawijaya AD ke bawah komando Mayjen Soeharto sebagai panglima Kostrad.⁴⁴ Dengan demikian pidato Soeharto lebih merupakan suatu upaya untuk mendiskreditkan AURI.⁴⁵

4.5 Dugaan Keterlibatan AURI dalam G-30-S

Adanya keterlibatan beberapa oknum dan penggunaan fasilitas institusi AURI, melahirkan kecurigaan berbagai pihak, bahwa AURI di bawah komando Omar Dani secara institusi ikut terlibat dalam G-30-S.⁴⁶ Apalagi pernyataan sikap Omar Dani pada pukul 10.00, 1 Oktober 1965, terkesan memberi dukungan terhadap operasi G-30-S.

Dalam pidato pengumumannya di RRI, Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto cenderung menyudutkan AURI. Mayjen Soeharto secara eksplisit menyebutkan bahwa dalam proses perubahan politik pasca G-30-S, AD- ALRI dan AKRI berada dalam pihak yang sama, sedangkan AURI sengaja tidak disebutkan berada dipihak yang mana. Mayjen Soeharto dalam pidato pada 1 Oktober malam menuturkan bahwa ”untuk sementara pimpinan AD kami pegang. Antara **AD**, **ALRI** dan **AKRI** telah terdapat saling pengertian, bekerdja sama dan

⁴⁴ *Kompas*, 6 Juli 1965; Crouch hal 107. Dari fakta ini, maka kita akan mendapatkan sebuah asumsi secara logis bahwa bagi Soeharto tempat ini bukanlah tempat yang asing. Bukan tidak mungkin, ia juga mengetahui adanya pelatihan sukarelawan disana. Mengingat disaat yang sama dilakukan pelatihan di bawah koordinasi Mayor (Udara) Soejono.

⁴⁵ David T. Johnson, *Op.Cit.*, hal.10.

⁴⁶ Sebagai contoh lihat Paul.F. Gardner, *50 Tahun Amerika Serikat-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hal.440-441. Gardner menuding Omar Dani-lah yang menyiapkan markas G-30-S di Halim.

kebulatan tekad penuh, untuk menumpas perbuatan Kontra Revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”⁴⁷

Selain kecurigaan yang dituturkan Soeharto, kecurigaan terhadap keterlibatan institusi AURI juga berlanjut dalam tataran akademis. Berbagai peneliti asing yang melakukan pengkajian mengenai peristiwa G-30-S, seperti Ulf Sundhaussen, menuliskan keterlibatan AURI berdasarkan kecurigaan PAU Halim, surat perintah Men/Pangau 1 Oktober serta pidato-pidato yang dilancarkan Soeharto.⁴⁸

4. 5.1 Pelatihan Sukarelawan

Dalam peristiwa G-30-S, para pemerhati peristiwa ini melihat adanya keterlibatan AURI dalam proses pelatihan sukarelawan yang kemudian tenaganya digunakan sebagai tenaga operasional G-30-S. Fakta ini sering digunakan untuk menyimpulkan bahwa secara institusi AURI memang mendukung G-30-S.⁴⁹

Menjelang 1965, PKI mengusulkan kepada presiden Sukarno tentang diperlukannya Angkatan Kelima yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai dalam memperkuat revolusi nasional. Menanggapi isu tersebut, AURI menyatakan persetujuannya, terutama sebagai kebutuhan praktis untuk menutupi kekurangan personel menjaga pangkalan-pangkalan AURI. Adapun mengenai komponen rakyat yang dilatih tersebut, secara prosedural diutamakan berasal dari rakyat

⁴⁷ Pidato Mayjen Soeharto pada 1 Oktober Malam di R.R.I. Cetak tebal dari peneliti. Lebih lanjut, lihat Lampiran 5.

⁴⁸ Ulf Sundhaussen, *Op.Cit.*, hal. 375

⁴⁹ John Hughes, *Op. Cit.*, hal. 23

yang berada di daerah sekitar pangkalan. Selanjutnya, Men/Pangau Omar Dani mengintruksikan kepada seluruh penanggung jawab pangkalan untuk melatih rakyat untuk menjaga pangkalan atau sering disebut Hansip AURI.

Pada bulan Juli 1965, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan, (PPP) Mayor (Udara) Soejono melaporkan kepada Men/Pangau Omar Dani di Wisma Angkasa mengenai rencana pelaksanaan wisuda sukarelawan angkatan pertama. Soejono juga melaporkan komposisi peserta serta diperlukannya bantuan-bantuan AURI untuk pelatihan mendatang. Peserta pelatihan adalah anggota Front Nasional yang terdiri dari lima orang golongan nasionalis, 2000 orang golongan komunis. Adapun golongan agama tidak diundang.⁵⁰ Menurut Omar Dani, setelah mendengar laporan tersebut, ia mengintruksikan agar dalam pelatihan berikutnya komposisi antara golongan Nasionalis-Agama dan Komunis dapat berimbang. Men/Pangau juga mengintruksikan agar setiap detail pelatihan sebaiknya dicatat dan dilaporkan kepada staf yang bersangkutan di AURI.⁵¹ Laporan tentang pelatihan itu selanjutnya dapat digunakan sebagai *standard* dalam pelatihan di pangkalan udara seluruh Indonesia. Akhirnya, Men/Pangau tidak bersedia mewisuda pelatihan tersebut. Mengenai permohonan bantuan AURI terhadap pelatihan, Men/Pangau menyarankan agar hal tersebut ditanyakan kepada staf berwenang di Departemen AURI. Secara prinsip, ia menyetujui pemberian bantuan dalam batas kemampuan AURI.

⁵⁰ Aristides, *Op.Cit.*, hal. 32

⁵¹ Pembelaan Omar Dani, dalam Omar Dani, *Op.Cit.*, hal. 240-241.

Pelatihan sukarelawan di Desa Lubang Buaya yang semula dilakukan untuk sukarelawan Dwikora, pada angkatan kedua telah diubah menjadi pelatihan kader PKI, karena pesertanya berasal dari unsur PKI atau yang bersimpati terhadap PKI.⁵² Akibatnya latihan kemiliteran di Desa Lubang Buaya kemudian menjadi permasalahan dikalangan AURI.

Saat Letkol (Udara) Farman, Kepala Pusat Penerangan AURI menugaskan kepada juru kamera untuk membuat dokumentasi film tentang pelatihan di Desa Lubang Buaya, mereka tidak diizinkan masuk ketempat pelatihan.⁵³ Pada awal September 1965, Komodor Dewanto, Deops Men/Pangau merangkap Direktur intelejen AURI memanggil Komodor Ramli Soemardi; panglima KOPPAU, Mayor (Udara) Soejono; Komandan Resimen PPP, Letkol (Udara) Hamsana; Perwira Operasi Korud V Jaya, Letkol (Udara) Rakiman; perwira KOPPAU dan beberapa perwira lain menghadiri rapat yang membahas mengenai pelatihan itu. Saat itu juga Komodor Dewanto memerintahkan agar latihan kemiliteran di Desa Lubang Buaya segera ditutup. Namun, perintah itu baru berhasil dilakukan pada 26 September 1965.⁵⁴

⁵² Dalam prakteknya yang menjadi pemegang wewenang dalam pelatihan tersebut tidak hanya Mayor Sujono dan orang-orangnya. Melainkan juga Nico dari Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Djohar dari Pemuda Rakyat (PR), Kasiman dari Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Hartojo dari Barisan tani Indonesia (BTI). Anggota CC PKI yang bertindak sebagai pengajar antara lain Tjugito dan Soemardi.

⁵³ Ketika Komodor Dewanto memantau kembali tempat tersebut, ternyata tempat tersebut sudah ditutup. Praktis secara institusi AURI tidak pernah tahu apa-apa yang dilakukan sesungguhnya.

⁵⁴ Aristides, *Op.Cit.*, hal 34-35

Selanjutnya sesudah terjadinya G-30-S, baru dapat diketahui bahwa sebagian bekas peserta pelatihan tersebut dimasukkan dalam pasukan-pasukan operasi G-30-S. baik kedalam pasukan Pasopati, Bimasakti dan Pringgadani.

4. 5.2 Penggunaan Fasilitas AURI

Dalam aksi G-30-S, terdapat bukti-bukti yang memberatkan AURI karena penggunaan beberapa fasilitasnya, meliputi: Penggunaan PN Aerial Survey (Penas) serta persenjataan dan truk AURI di Desa Lubang Buaya.

Pada malam 30 September hingga 1 Oktober, gedung Penas yang letaknya dipinggir jalan *By Pass* Jakarta-Timur telah digunakan sebagai pusat komando oleh para pelaku G-30-S. Diantara tokoh G-30-S yang memantau jalannya operasi dari Penas antara lain Kol. Latief, Letkol Untung dan Sjam. Sesudah berlangsungnya operasi pada dini hari, gedung Penas ditinggalkan untuk selanjutnya beralih ke Pangkalan AURI Halim.

Melihat letaknya, Gedung Penas berada jauh diluar Desa Lubang Buaya dan PAU Halim. Adapun isyarat secara tidak langsung mengenai penggunaan gedung Penas oleh G-30-S, sebenarnya sudah tersirat dalam pembicaraan antara Letkol (Udara) Heru Atmodjo dengan Mayor (Udara) Soejono pada tanggal 30 September sekitar pukul 14.00 di Pondok Gede. Soejono tanpa menyebutkan alasannya, mengutarakan bahwa ia akan menggunakan fasilitas AURI, dengan atau tanpa seizin atasan.⁵⁵ Rupanya, salah satu fasilitas yang dimaksud Soejono

⁵⁵ Wawancara dengan Heru Atmodjo 09-06-2004; Wawancara dengan Sri Mulyono Herlambang 22-06-2003.

kepada Heru Atmodjo adalah gedung Penas. Namun, sebagai seorang anggota AURI dan juga pengatur jalannya gerakan. Soejono tidak pernah melakukan permintaan kepada MBAU untuk menggunakan gedung Penas. Soejono menggunakan Penas sebagai salah-satu fasilitas AURI dalam fungsinya sebagai pengatur gerakan G-30-S, diluar koordinasi AURI sebagai suatu institusi. Namun demikian, tidak adanya upaya mencegah penyalahgunaan fasilitas AURI merupakan pertanda bahwa AURI tidak berkeberatan terhadap maksud Soejono.

Penggunaan fasilitas persenjataan dan truk AURI didapatkan Kostrad ketika diadakan penyisiran daerah Desa Lubang Buaya pada 3 Oktober untuk mencari jejak-jejak pelaku G-30-S dan hilangnya para jenderal. Di Desa Lubang Buaya, Kostrad menemukan sebuah truk *Ziel* buatan Soviet berwarna biru, milik resimen PPP dan sejumlah peluru kaliber 7,62 mm dalam peti logam berwarna hijau zaitun yang bertuliskan AURI berwarna kuning.⁵⁶ Di Istana Bogor, Mayjen Soeharto kemudian menunjukkan bukti tersebut kepada Presiden Sukarno, Men/Pangau Omar Dani serta Komodor Leo Wattimena.

Penemuan barang bukti di atas, berhubungan dengan pertemuan Mayor (Udara) Gathut Sukrisno, seorang pelaku militer G-30-S, menjelang 1 Oktober. Gathut ketika itu menghadap Kolonel (Udara) Wisnoe Djajengmihardo, Komandan PAU Halim, dan mengutarakan maksudnya untuk meminjam 3000 pucuk senjata yang sebagian besar senjata itu berupa *Chung* atau senapan jenis 556 SKS buatan RRC. Namun, permintaan Ghatut tersebut di tolak Kolonel

⁵⁶ Aristides, *Op.Cit.*, hal.181

Wisnoe. Setelah permintaan Gathut ditolak, gudang senjata AURI di daerah Mampang dibongkar secara paksa oleh anggota resimen PPP.⁵⁷ Waktu pembongkaran ditulis secara berbeda oleh dua sumber. Keterangan buku putih sekretariat negara menulis pembongkaran terjadi pada dini hari 1 Oktober, sedangkan buku Menyingkap Kabut Halim menyebutkan pada pukul 02.00 WIB 2 Oktober.⁵⁸

Adanya pembongkaran merupakan bukti langsung tidak terkaitnya AURI dalam bantuan fasilitas kelompok G-30-S. Jika AURI ikut terlibat dalam G-30-S, maka AURI tidak perlu melakukan pembongkaran secara paksa terhadap gedung senjatanya sendiri. Selain itu, waktu terjadinya pembongkaran juga terkesan ganjil. Dalam versi AURI pembongkaran terjadi pada 2 Oktober, ketika G-30-S sudah dipastikan mengalami kegagalan.⁵⁹ Apabila versi yang benar adalah versi buku-putih, maka tujuannya adalah untuk membantu operasi penculikan jenderal. Hal yang menjadi pertanyaan, mengapa G-3-S yang dipimpin Komandan Resimen Cakrabirawa, Letkol Untung menggunakan fasilitas AURI yang mencolok, tidak menggunakan fasilitas AD atau Cakrabirawa.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 216. Ashadi Tjahjadi menyebut tindakan ini dilakukan Sujono. Lihat. Imran Hasibuan Dkk, *Op.,Cit.*, hal 113.

⁵⁸ Sekretariat Negara, *Op.Cit.*, hal. 103. Aristiddes, *Op. Cit.*, hal. 216.

⁵⁹ Dalam sumber Setneg, tidak disebutkan asal sumber dari mana. Sedangkan dalam kesaksian Ghatut di depan Mahmillub Untung, peristiwa ini tidak dijelaskan. Sumber AURI berdasarkan sumber lisan yang dapat melengkapi kekosongan sumber sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Adapun G-30-S, pada malam 1 Oktober tokoh-tokoh pentingnya sudah menyingkir keluar kota. Hal ini karena G-30-S tidak mendapatkan dukungan presiden Sukarno, terlebih saat itu juga RRI dan Telkom sudah berhasil dikuasai RPKAD.

Terpenting dari interpretasi di atas, penemuan truk dan peluru AURI di Desa Lubang Buaya sendiri adalah sebuah keanehan, karena bukti yang demikian penting ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku gerakan sesudah mengubur jenderal. Padahal seharusnya, truk masih dapat digunakan secara efektif untuk membantu pelaksanaan kudeta di pusat kota Jakarta. Hal ini juga bertolak belakang dengan mayat jenderal, yang mereka kuburkan dengan sangat rapi, dalam sebuah sumur tua yang disamarkan dengan tumpukan daun. Sangat mungkin bahwa ditinggalkannya bukti-bukti ini, dilakukan secara sengaja untuk mendiskreditkan AURI. Bukan juga tidak mungkin, jika benar pembongkaran dilakukan pada tanggal 2 Oktober. Berarti pembongkaran itu dilakukan bukan untuk pelaksanaan G-30-S, tetapi untuk membuktikan keterlibatan AURI.

4. 5.3 Para Perwira yang Terlibat

Dalam G-30-S memang terdapat oknum AURI ikut terlibat sebagai pelaku G-30-S, meliputi: Mayor (Udara) Soejono dan Gathut Sukresno. Mayor (Udara) Soejono terlibat aktif sejak perencanaan hingga pelaksanaan operasi. Diantaranya ia bertanggung jawab terhadap pelatihan di Desa Lubang Buaya, penggunaan fasilitas Penas dan penyediaan logistik bagi gerakan. Sedangkan Gathut Sukresno bertindak sebagai komandan pasukan Pringgadani yang bertugas menerima dan kemudian membunuh perwira AD yang masih hidup atas perintah Mayor (Udara) Soejono. Menurut *Cornell Paper*, hubungan antara kelompok Untung dengan

beberapa perwira AURI terjadi melalui kontak yang berlangsung pada saat operasi gabungan di Irian Barat atau juga melalui unit PGT.⁶⁰

Keikutsertaan Soejono maupun Gathut tidak di bawah koordinasi formal AURI, melainkan di bawah kedudukannya sebagai Cenko dan Komandan Pringgadani yang dibentuk sebagai perlindungan terhadap jalannya revolusi dan pengamanan presiden. Namun sebagai seorang perwira yang taat terhadap pemimpin, keikutsertaan mereka juga dilandasi keyakinan bahwa gerakan tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Sukarno dan Men/Pangau Omar Dani. Mengenai keyakinan ini Soejono mengatakan sebab-sebabnya:

“ Letnan Kolonel UNTUNG tidak hanya tanggal 6 September tetapi juga pada tanggal 12/13 September selalu mengatakan kepada saya bahwa Jang Mulia Menteri/Panglima Angkatan Udara telah tahu didalam soal ini, juga diinjatkan bahwa Pemimpin Besar Revolusi BUNG KARNO telah mengetahui tentang gerakan apa yang dinamakan olehnja Dewan Djenderal juga didalam usahanja untuk membujuk saja atau dengan tipu muslihatnja selalu memberikan pujian-pujian jang berlebih-lebihan kepada J.M Menteri MEN/PANGAU OMAR DHANI waktu itu”.⁶¹

Dengan demikian, keikutsertaan Soejono disebabkan bujukan Letkol Untung. Soejono yakin dan percaya akan ajakan Untung, karena Untung meyakinkan bahwa setiap rencana gerakannya telah diketahui oleh presiden dan juga Men/Pangau. Tentunya, alasan tersebut sangat sukar dibantah oleh perwira yang *progressif revolutioner* dan mengikuti presiden *tanpa reserve*. Maka dapat disimpulkan, bahwa keterlibatan Soejono adalah karena kepercayaan yang

⁶⁰ Benedict R. Anderson and Ruth T. Mc Vey, *Op.Cit.*, hal.10

⁶¹ Kesaksian Supardjo: Mahmillub Untung, *Op. Cit.*, hal. 91-92

berlebihan kepada Untung serta ia tidak memeriksa ulang kebenaran informasi yang disampaikan Untung.

Keyakinan Soejono ini kemudian juga menyeret bawahannya, Gathut Sukrisno, untuk terlibat dalam operasi G-30-S. Dengan demikian, runutan keikutsertaan para perwira AURI dalam G-30-S, tidak lepas dari kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap Soejono. Namun, patut dipahami, ketika berlangsung operasi tersebut Soejono bertindak dalam kapasitasnya sebagai pasukan G-30-S, bukan anggota AURI. Sebagai contoh mengenai keterlepasan AURI dan sistim komando Soejono, dalam Mahmillub Gathut Sukresno memberikan kesaksian bahwa keikutsertaannya dalam G30-S adalah penugasan "dari ex. Major udara Sujono dalam kedudukannya sebagai anggota CENKO, sebagai Komandan Komando Tjadangan Tempur yang berada di Pasar Rebo Lubang Buaya".⁶²

Adapun Men/Pangau Omar Dani, Heru Atmodjo, Suwardi, Susanto dan Anis Sujatno keterlibatannya hanya bersifat dugaan dan prasangka. Hal ini sebagai akibat sangkut pautnya mereka dalam bagian-bagian gerakan. Anis, Susanto dan Suwardi keterlibatannya hanya dilihat sebatas pemberian logistik terhadap gerakan yaitu penggunaan rumah mereka.

Dugaan keterlibatan Omar Dani dimulai dari berbagai kebijakannya sebelum terjadi G-30-S yang dinilai mendukung pelaksanaan G-30-S. Hal ini meliputi pandangannya yang menyetujui terbentuknya Angkatan Kelima serta pelaksanaan Operasi Utuh untuk mengamankan presiden. Pada saat terjadinya G-

⁶² *Ibid.*, hal. 67-68

30-S, Omar Dani terlibat karena keberadaannya di Halim pada 1 Oktober serta surat perintah hariannya pada 1 Oktober 1965 yang mendukung G-30-S.

Dalam biografi sekaligus *pledoinya*, Omar Dani menjelaskan mengenai persoalan Angkatan Kelima. Omar Dani menyebutkan bahwa persetujuannya tentang angkatan kelima adalah bukan membentuk angkatan baru, melainkan untuk memenuhi kebutuhan militer yang didasarkan ketetapan struktur pertahanan, skema pertahanan rakyat.⁶³ Terhadap operasi utuh, Omar menegaskan bahwa operasi ini dilakukan semata-mata untuk melindungi jalannya revolusi dan presiden.⁶⁴ Namun, dukungan-dukungan Omar Dani menjelang G-30-S secara politik dapat dilihat sebagai upaya menguatkan kampanye PKI dalam menggalang dukungan dari Angkatan Bersenjata. Apalagi pada isu yang sama, angkatan lain lebih jauh hati-hati dalam memandang suatu persoalan politik.

Hal yang memperberat dakwaan Men/Pangau Omar Dani adalah sikapnya pada 1 Oktober 1965. Omar tidak melaporkan informasi yang didapat dari intelnya kepada Presiden Sukarno, mengirimkan helikopter untuk menjemput Supardjo, membuat surat pernyataan dukungan terhadap G-30-S serta menerbangkan pesawat untuk DN Aidit ke Yogyakarta. Sangat sulit untuk melihat rangkaian sikap Omar Dani sebagai sebuah kebetulan. Namun, persoalan penting adalah kepada siapa dukungan Omar ditujukan, apakah kepada G-30-S yang dikoordinir PKI atau G-30-S yang dimengerti sebagai suatu gerakan

⁶³ Omar Dani, *Op.Cit.*, hal. 39. Omar Dani menyamakan konsep rakyat dipersenjatai tersebut kira-kira sama dengan rakyat terlatih pada era Presiden Habibie.

⁶⁴ Mahmillub Dr. Subandrio, *Op.Cit.*, hal. 156.

menyelamatkan presiden. Tentunya pertanyaan ini adalah persoalan yang sukar dijawab.

Adapun dugaan keterlibatan Heru Atmodjo didasarkan pada tiga dugaan. Pertama, Heru Atmodjo dianggap mengetahui perencanaan G-30-S seperti dalam rincian laporannya kepada Men/Pangau Omar Dani. Kedua, keberadaan Heru Atmodjo bersama tokoh G-30-S, Brigjen Supardjo di Istana Merdeka, di Penas dan Pangkalan AURI Halim pada 1 Oktober. Ketiga, Heru Atmodjo dianggap terlibat lewat bukti penanda-tanganan statement G-30-S dan kedudukannya sebagai wakil ketua dalam daftar Dewan Revolusi G-30-S yang disiarkan lewat RRI.

Dalam buku pembelaannya yang terbit pada tahun 2004, Heru Atmodjo menyampaikan informasi bahwa keberadaannya bersama Supardjo adalah suatu kebetulan dalam kapasitasnya sebagai intel AURI, sama seperti Omar Dani, kiranya kebetulan yang berkelanjutan sulit untuk diterima. Coen Holtzappel, seorang penulis asing, bahkan menyebutkan bahwa Heru Atmodjo adalah dalang G-30-S.⁶⁵ Coen melihat adanya upaya intelejen yang dipimpin Heru Atmodjo, terutama karena dialah perwira intel yang keterlibatannya baru terlihat saat terjadinya G-30-S. Hal ini dipandang sebagai kerja khas operasi intelejen. Hal

⁶⁵ Coen Holtzappel, *The 30 September Movement: A Political Movement of the Armed Forces or an Intelligence Operation?*, (Journal of Contemporary Asia, 9 (2), 1979), hal. 216-239. Menurut Asvi Warman Adam, kapasitas keilmuan Coen dikalangan sejarawan eropa tidak terlampau dihargai, para ilmuwan eropa menganjurkan agar keterangan Coen tidak usah didengarkan. Heru Atmodjo sendiri akhirnya menulis jawaban tudingan Coen berupa kesaksiannya terhadap G-30-S dalam bukunya berjudul: *Gerakan 30 September 1965; Kesaksian Letkol (Penerbang) Heru Atmodjo*, (Jakarta: ISAI, PCE dan Hasta Mitra, 2004).

yang menguatkan keterlibatan adalah tanda-tangannya dalam naskah testamen politik G-30-S yang kemudian disiarkan R.R.I. Di hadapan Mahmilub, Heru Atmodjo tidak menyangkal kebenaran penanda-tanganannya tersebut.

“saja siang tanggal satu itu menandatangani suatu naskah. Pada waktu itu saja kembali mengantar djenderal SUPARDJO menghadap Panglima Tertinggi di Halim, kemudian menudju kerumah Sersan Udara SUJATNO, lalu waktu itu kami sedang lelah, datang Major Udara SUJONO menjodorkan pada kami satu naskah, naskah itu kalau tidak keliru isinja DEKRIT. Saja tidak membatja lebih dari satu kali DEKRIT itu. Sesudah Major SUJONO itu mengatakan kepada saja jaitu. „Pak HERU ATMODOJO dulu tanda tangan”. Dimana tempat tanda tangan? „Disebelah” ini, ada tempatnya disebelah kiri”. Lalu saja pada waktu itu tidak pandjang lebar memikir, saja tanda tangani.⁶⁶

Namun dalam kesaksian Heru Atmodjo yang baru, ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah melakukan penandatanganan apapun mengenai dekrit yang dikeluarkan Dewan Revolusi G-30-S. bahkan ia berkeyakinan bahwa tanda-tangannya telah dipalsukan oleh orang lain.⁶⁷ Lebih lanjut Heru Atmodjo mempertanyakan kebenaran Letkol Heru dalam “Dewan Revolusi” adalah dirinya, karena di AURI ada beberapa nama Heru. Seharusnya apabila nama yang ditulis adalah dirinya, maka tulisannya adalah Letkol (Penerbang) Heru Atmodjo.

⁶⁶ Kesaksian Heru Atmodjo: Mahmilub Untung, *Op. Cit* , hal.75.

⁶⁷ Wawancara dengan Heru Atmodjo 09-06-2004 dan 07-09-2007. Keterangan Heru di atas lebih bersifat mengaburkan fakta, karena tanpa menyebut nama belakang Atmodjo dan titel pnerbang-pun dapat diketahui bahwa nama Heru yang dimaksud adalah dirinya. Apalagi dalam G-30-S, hanya terdapat satu orang yang bernama Heru berpangkat Letnan Kolonel Angkatan Udara, yakni Heru Atmodjo.